



BMBPSDM
Balai Litbang Agama Makassar



EVALUASI RENSTRA --- 2020 - 2024



Balai Litbang Agama
Makassar



bla_makassar



blamakassar



Blamakassar.kemenag.go.id



bla makassar
BLAM News Official

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum wr. wb.



Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Balai Litbang Agama Makassar telah menyelesaikan Evaluasi Renstra (Rencana Strategis) Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020-2024 sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja Balai Litbang Agama Makassar dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020-2024.

Evaluasi ini berisi perencanaan program dan anggaran tahun 2020-2024, evaluasi kinerja/realisasi penyerapan anggaran tahun 2020-2024 dan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pencapaian target program serta solusi tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan program dan anggaran.

Secara umum, target kinerja program tahun 2020-2024 dapat dicapai dengan baik, namun disadari masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sehingga beberapa kegiatan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan bahwa pengintegrasian unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Kementerian/Lembaga diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil Kementerian/Lembaga ke lingkungan BRIN. Balai Litbang Agama Makassar, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan terkena dampak dari kebijakan ini dengan berpindahannya SDM Peneliti ke BRIN.

Pada tahun 2023, terbit Perpres Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama yang didalamnya mengatur perubahan Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Pada bulan Oktober tahun 2024 terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagai turunan dari Perpres Nomor 12 Tahun 2023 yang memperkuat perubahan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama. Tetapi tidak diikuti dengan terbitnya regulasi terkait perubahan ortaker Balai Litbang Agama.

Sesudah terjadi pergantian kepemimpinan nasional, terbitlah Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PMA Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Kembali regulasi terkait ortaker Balai Litbang Agama tidak kunjung hadir. Walaupun organisasi Eselon I sudah berubah nomenklatur serta tugas dan fungsi, namun hingga akhir tahun 2024 secara dokumen perencanaan informasi kinerja masih menggunakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Padahal secara sumber daya manusia, sejak Januari tahun 2022 sejumlah peneliti sudah secara resmi dilantik dan dipindah ke BRIN. Hal ini menyebabkan beberapa indikator kinerja yang tertera pada Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama khususnya indikator kinerja kelitbangan tidak dapat tercapai/dipenuhi karena kebijakan tersebut dan juga berdampak pada Balai Litbang Agama.

Kami berharap Evaluasi Renstra Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020-2024 ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan bagi perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode Renstra berikutnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi dan memberkahi kita semua.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Makassar, 7 Juli 2025

Kepala Balai Litbang Agama Makassar,



Saprillah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR ISTILAH.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Dasar Hukum.....	3
BAB II RENCANA STRATEGIS BALITBANG AGAMA MAKASSAR TAHUN 2020-2024... 5	5
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	8
2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....	12
2.4 Program dan Kegiatan Balai Litbang Agama Makassar.....	17
2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Litbang Agama Makassar.....	18
BAB III EVALUASI TAHUN 2020-2024	19
3.1 Analisis Kinerja Balitbang Diklat 2020-2024	19
3.2 Analisis Realisasi Anggaran Balai Litbang Agama Makassar 2020-2024	49
3.3 Implementasi Arah Kebijakan Strategi.....	65
BAB IV PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbang Agama Makassar	3
Gambar 2.1 Visi Kementerian Agama 2020-2024	5
Gambar 2.2 Sasaran Kinerja 1 (SK1).....	9
Gambar 2.3 Sasaran Kinerja 2 (SK2).....	10
Gambar 2.4 Sasaran Kinerja 3 (SK3).....	10
Gambar 2.5 Sasaran Kinerja 4 (SK4).....	11
Gambar 2.6 Sasaran Kinerja 5 (SK5).....	11
Gambar 2.7 Sasaran Kinerja 6 (SK6).....	11
Gambar 2.8 Sasaran Kinerja 7 (SK7).....	12
Gambar 2.9 Sasaran Kinerja 8 (SK8).....	12
Gambar 2.10 Sasaran Kinerja 9 (SK9).....	12
Gambar 3.1 Policy Paper	24
Gambar 3.2 Policy Paper Tahun 2020.....	26
Gambar 3.3 Policy Paper Tahun 2021.....	28
Gambar 3.4 Policy Paper Tahun 2022.....	29
Gambar 3.5 Policy Paper Tahun 2023.....	31
Gambar 3.6 Policy Paper Tahun 2024.....	32
Gambar 3.7 Jurnal Balai Litbang Agama Makassar.....	34
Gambar 3.8 Jurnal Al Qalam Balai Litbang Agama Makassar.....	35
Gambar 3.9 HaKI Balai Litbang Agama Makassar.....	36
Gambar 3.10 Festival Musik.....	66
Gambar 3.11 BlamCorner.....	66
Gambar 3.12 Penelitian Berbasis Daring	67
Gambar 3.13 Policy Paper	67
Gambar 3.14 Kerja Sama	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020 - 2024.....	12
Tabel 3.1 Realisasi Target Renstra 2020 - 2024	21
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian	22
Tabel 3.3 Capaian Indikator Jumlah Penelitian yang menghasilkan Naskah Kebijakan.....	24
Tabel 3.4 Capaian Indikator Persentase Publikasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian	34
Tabel 3.5 Capaian Indikator Jumlah Produk Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian yang layak diajukan memperoleh HaKI	35
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	39
Tabel 3.7 Capaian Indikator Persentase keselarasan Perencanaan Program dan Anggaran Sesuai Renstra.....	41
Tabel 3.8 Capaian Indikator Jumlah Dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar.....	42
Tabel 3.9 Capaian Indikator Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.....	43
Tabel 3.10 Capaian Indikator Persentase Aset yang diinventarisasikan BMN	44
Tabel 3.11 Capaian Indikator Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP....	45
Tabel 3.12 Capaian Indikator Persentase ASN yang memiliki Nilai Indeks Profesional berkategori tinggi (minimum 81)	47
Tabel 3.13 Capaian Indikator Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	49
Tabel 3.14 Perbandingan Alokasi Anggaran Balai Litbang Agama Makassar 2020-2024 berdasarkan Renstra Dan Pagu RKAKL	51
Tabel 3.15 Pagu Realisasi Tahun Anggaran 2020 - 2024 berdasarkan Jenis Belanja...	53
Tabel 3.16 Pagu Realisasi Tahun Anggaran 2020 - 2024 berdasarkan Fungsi	54
Tabel 3.17 Pagu Realisasi Tahun Anggaran 2020 - 2024 berdasarkan Kegiatan	55
Tabel 3.18 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2020	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Tren Pagu Renstra, RKAKL dan Realisasi 2020 - 2024	52
Grafik 3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja	54
Grafik 3.3 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran per Fungsi	55
Grafik 3.4 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran per Kegiatan	56
Grafik 3.5 Nilai Smart Tahun Anggaran 2021	60
Grafik 3.6 Nilai Smart Tahun Anggaran 2022	61
Grafik 3.7 Nilai Smart Tahun Anggaran 2023	62
Grafik 3.8 Nilai Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024	63
Grafik 3.9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	63
Grafik 3.10 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024	63

DAFTAR ISTILAH

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPJPH	: Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
Daring	: Dalam Jaringan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
HAKI	: Hak atas Kekayaan Intelektual
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
ISO	: International Standard of Organization
KMA	: Keputusan Menteri Agama
Litbangjirap	: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
Perpres	: Peraturan Presiden
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PP	: Peraturan Pemerintah
PTKN	: Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPPA	: Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) Tahun 2020-2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, tantangan, dan arah pengembangan lembaga di masa mendatang. Secara umum, kinerja BLAM berada pada kategori baik, dengan tingkat realisasi anggaran rata-rata mencapai lebih dari 98% setiap tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa BLAM mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia meskipun menghadapi berbagai dinamika kebijakan nasional serta perubahan mendasar pada kelembagaan penelitian dan pengembangan.

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, fungsi penelitian di Kementerian Agama, termasuk BLAM, mengalami peralihan. Kondisi ini menimbulkan ketidaksinkronan antara indikator kinerja utama dalam Renstra dengan implementasi kegiatan di lapangan. Banyak indikator yang semula berbasis penelitian tidak lagi relevan setelah peneliti beralih menjadi bagian BRIN. Meskipun demikian, BLAM tetap menjaga konsistensi kinerja dengan mengalihkan fokus program pada penguatan moderasi beragama, pengembangan kebijakan, serta tata kelola ASN.

Evaluasi juga menemukan bahwa BLAM memiliki kekuatan pada efisiensi anggaran. Serapan anggaran yang konsisten tinggi menandakan adanya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi kebijakan refocusing, khususnya di masa pandemi Covid-19. Namun, dari sisi substansi, capaian output belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas yang diharapkan karena perubahan fungsi kelembagaan belum diikuti dengan revisi Renstra dan indikator kinerja yang relevan.

Secara garis besar, terdapat tiga temuan penting dari evaluasi ini:

1. Tingkat efisiensi anggaran sangat baik, dengan serapan rata-rata di atas 98%.
2. Ketidaksinkronan antara Renstra dan implementasi pasca-terbitnya kebijakan BRIN, sehingga sebagian indikator tidak dapat dilanjutkan.
3. Transformasi kelembagaan menggeser fokus BLAM dari penelitian menuju pengembangan kebijakan dan moderasi beragama, yang memerlukan indikator baru agar kinerja lebih terukur.

Berdasarkan temuan tersebut, evaluasi merekomendasikan agar pasca-2024 dilakukan penyusunan Renstra baru yang lebih realistis, adaptif, dan sesuai dengan mandat kelembagaan terkini Kementerian Agama. Penyesuaian indikator kinerja menjadi hal yang mendesak agar serapan anggaran tidak hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga efektivitas dan kebermaknaan terhadap tujuan strategis.

Dengan demikian, meskipun capaian Renstra 2020-2024 dapat dikategorikan baik, arah kelembagaan BLAM ke depan perlu ditata ulang agar tetap mampu berkontribusi signifikan dalam pembangunan bidang keagamaan di Indonesia, khususnya melalui penguatan moderasi beragama, advokasi kebijakan, dan tata kelola kelembagaan yang adaptif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang mengacu pada RPJMN serta kebijakan nasional terkait. Rencana ini menjadi pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan instansi selama lima tahun, sekaligus acuan pengukuran kinerja.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024 pada Bab III yang berisi Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama dimana seluruh program dirancang untuk selaras dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, khususnya misi pembangunan yang relevan dengan tugas Kementerian Agama, seperti:

- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dan moderat.
- Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui kerukunan antarumat beragama.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berwibawa.

Balai Litbang Agama Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang menjadi supporting agency dalam mendukung kinerjanya sebagai penyedia layanan penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan terkait pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan. Hal ini tertuang dalam Renstra Balai Litbang Agama Makassar dimana dalam kurun waktu 2020 - 2024, telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai implementasi dari Renstra Badan Litbang dan Diklat dan outcomes yang hendak dicapai.

Secara konsisten Balai Litbang Agama Makassar berusaha meningkatkan kualitas produk penelitian dan pengembangan yang diarahkan pada pencapaian target kinerja program penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan pembangunan juga menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, dan inovasi pelayanan publik berbasis penelitian.

Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauhmana target-target yang tertuang dalam Renstra telah tercapai, tetapi juga menjadi sarana untuk menganalisis efektivitas program, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja di periode selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi Renstra berperan sebagai *feedback loop* yang menjamin keberlanjutan, relevansi, dan kualitas

penyelenggaraan program pembangunan.

Evaluasi terhadap Renstra 2020-2024 menjadi momentum penting untuk menilai capaian indikator kinerja utama, tingkat keberhasilan program, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama dan pembangunan nasional di bidang kehidupan beragama. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Makassar sepanjang 5 tahun anggaran.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Evaluasi Renstra Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Makassar selama Tahun 2020-2024;
2. Melaporkan capaian Kinerja Balai Litbang Agama Makassar selama Tahun 2020-2024 baik kepada internal Kementerian Agama maupun eksternal Kementerian Agama.

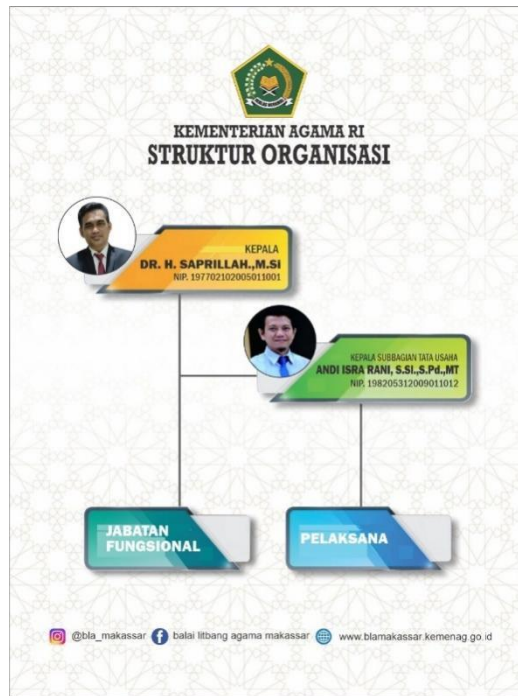
1.3. Struktur Organisasi

Tahun 2020, struktur organisasi Balai Litbang Agama masih mengacu pada KMA Nomer 346 Tahun 2004 dimana didalamnya memuat 1 Eselon III yaitu Kepala Balai, 1 Eselon IV Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 Eselon V Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Ortala dan Kepegawaian serta Jabatan Fungsional yang berada langsung di bawah Kepala Balai.

Pada tahun 2021, pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di dalam regulasi tersebut, khususnya pasal 65 mengatur peralihan tugas, fungsi dan kewenangan serta pengalihan pegawai negeri sipil utamanya Fungsional Peneliti dari Kementerian/Lembaga ke BRIN. Dampak dari terbitnya Peraturan Presiden tersebut adalah hilangnya tugas pokok dan fungsi kelitbangan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang secara otomatis berdasarkan struktur akan turun pada Balai Litbang Agama.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya aturan tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama Makassar, yang mengatur tentang kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, jabatan fungsional, tempat kedudukan dan wilayah kerja, eselonisasi dan tata kerja. Dijelaskan didalamnya bahwa struktur organisasi Balai Litbang Agama Makassar terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbang Agama Makassar

Pada tahun 2021, terbit Perpres 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama yang didalamnya mengatur perubahan Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Pada bulan Oktober tahun 2024 terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagai turunan dari Perpres Nomor 12 Tahun 2023 yang memperkuat perubahan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama. Terbitnya kedua peraturan tersebut tidak diikuti dengan aturan turunan bagi Balai Litbang Agama. Efeknya Balai Litbang Agama berada di masa transisi yang berkepanjangan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomer 78 di tahun 2021.

Sesudah terjadi pergantian kepemimpinan nasional, terbitlah Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama, ditindaklanjuti dengan terbitnya PMA Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Hingga akhir tahun 2024 regulasi terkait Balai Litbang Agama tak kunjung terbit. Selain itu yang menjadi keghundahan adalah unit eselon I yang sudah berubah nomenklatur serta tugas dan fungsi, secara dokumen perencanaan informasi kinerja masih menggunakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Evaluasi Renstra ini mencakup Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2020-2024 Balai Litbang Agama Makassar.

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 Tahun 2023, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama;
 13. Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 59 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Capaian Program dan Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
 14. Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 51 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama; dan
 15. Keputusan Kepala Balai Litbang Agama Makassar Nomor: 1312/Blit.03/OT.01.1/08/2020 tentang Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2020 - 2024.

BAB II

RENCANA STRATEGIS BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR TAHUN 2020-2024

2.1 Visi dan Misi

Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Litbang dan Diklat diarahkan sebagai penjabaran terhadap rencana program yang diamanatkan dalam visi dan misi Presiden, RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi organisasi, kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi. Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai unit teknis, BLAM berfungsi melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan kebijakan, advokasi, dan layanan informasi keagamaan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas nasional yang ditetapkan oleh BMBPSDM.

Oleh karena itu, visi dan misi BLAM sepenuhnya merujuk dan mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

A. Visi Kementerian Agama:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”



Gambar 2.1 Visi Kementerian Agama 2020 - 2024

Visi ini merupakan rumusan arah pembangunan keagamaan nasional yang menjadi bagian integral dari visi pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024, yakni *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan*

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pertama, masyarakat yang saleh menggambarkan kondisi umat beragama yang memiliki kesalehan individual dan sosial. Kesalehan di sini tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan terhadap ajaran agama secara ritual, tetapi juga dalam pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat yang saleh adalah masyarakat yang menempatkan agama sebagai sumber etika publik, mendorong terciptanya keadilan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, Kementerian Agama berperan penting dalam pembinaan kehidupan beragama, peningkatan pemahaman keagamaan, serta penguatan lembaga pendidikan dan dakwah yang menumbuhkan akhlak mulia.

Kedua, masyarakat yang moderat bermakna masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, keseimbangan, dan sikap menghargai perbedaan. Moderasi beragama menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keragaman agama, budaya, dan suku bangsa Indonesia. Kementerian Agama memandang moderasi beragama sebagai jalan tengah yang menghindari ekstremisme dan eksklusivisme dalam beragama. Upaya penguatan moderasi dilakukan melalui pendidikan, dialog antarumat, literasi keagamaan, dan pengarusutamaan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama.

Ketiga, masyarakat yang cerdas menunjukkan orientasi pada peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan yang berwawasan luas, terbuka, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kecerdasan masyarakat tidak hanya diukur dari kemampuan akademik, tetapi juga dari kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Kementerian Agama menekankan pentingnya modernisasi lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan mutu madrasah dan perguruan tinggi keagamaan, serta riset keagamaan yang mendukung inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Keempat, masyarakat yang unggul menggambarkan cita-cita untuk melahirkan sumber daya manusia keagamaan yang berkompeten, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Keunggulan tidak hanya tercermin dalam kemampuan teknis atau akademis, tetapi juga dalam karakter dan etos kerja. Untuk itu, Kementerian Agama berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalitas ASN, mengembangkan transformasi digital, serta menciptakan birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

B. Misi Kementerian Agama

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, inklusif, dan profesional;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani;
6. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi aparatur Kementerian Agama.

Misi yang pertama, menekankan pentingnya pembinaan dan peningkatan pemahaman keagamaan umat yang komprehensif, baik dalam aspek ritual maupun sosial. Kementerian Agama berupaya mewujudkan masyarakat yang

beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui kegiatan dakwah, penyuluhan, dan penguatan lembaga keagamaan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan ibadah dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang religius dan harmonis.

Misi yang kedua, berorientasi pada penguatan sikap dan perilaku keberagamaan yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama menjadi strategi utama Kementerian Agama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keragaman agama, budaya, dan suku. Program pengarusutamaan moderasi beragama dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan ASN, literasi publik, pengembangan Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), serta forum dialog lintas agama untuk memperkuat harmoni sosial dan kerukunan nasional.

Misi yang ketiga, Kementerian Agama berupaya memastikan seluruh layanan publik keagamaan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Reformasi birokrasi di bidang layanan keagamaan diwujudkan dengan penguatan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui program Revitalisasi KUA, digitalisasi layanan pernikahan, pengelolaan haji dan umrah yang transparan, serta peningkatan kualitas bimbingan masyarakat. Dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme, Kemenag mendorong pelayanan yang semakin cepat, adaptif, dan berbasis teknologi.

Misi yang keempat, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, baik di madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan. Misi ini menekankan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Melalui modernisasi madrasah, peningkatan akreditasi lembaga pendidikan, penyediaan beasiswa, serta pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, Kemenag berupaya melahirkan generasi berilmu, berakarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Misi yang kelima, menggambarkan komitmen Kementerian Agama dalam menerapkan prinsip *good governance*. Upaya yang dilakukan antara lain adalah penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), transparansi pengelolaan keuangan, serta pencegahan korupsi melalui sistem pengawasan internal yang ketat. Kementerian Agama terus mengembangkan inovasi pelayanan publik, memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, serta memastikan bahwa seluruh proses birokrasi berorientasi pada kepentingan masyarakat dan hasil nyata (*outcome-based management*).

Misi yang keenam, berfokus pada pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, kompeten, dan responsif terhadap perubahan zaman. Kementerian Agama mendorong transformasi digital dan pembelajaran sepanjang hayat bagi ASN melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan *coaching*. Selain itu, implementasi sistem merit ASN dijalankan untuk menjamin penempatan dan pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan senioritas. Peningkatan profesionalitas ASN menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan keagamaan yang prima dan terpercaya.

Keenam misi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan arah pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama

menempatkan agama bukan hanya sebagai urusan privat, tetapi juga sebagai pilar pembangunan nasional. Dengan misi yang mencakup aspek spiritual, sosial, birokrasi, dan profesionalitas aparatur, Kemenag berupaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, toleran, berpengetahuan, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Maju 2045.

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis merupakan arah hasil yang ingin dicapai oleh satuan kerja dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran strategis Balai Litbang Agama Makassar dirumuskan untuk mendukung sasaran strategis Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) dan Kementerian Agama secara keseluruhan.

Mengacu pada hal tersebut, tujuan dan sasaran Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Balai Litbang Agama Makassar berfungsi ikut mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan penjabaran visi misi Kementerian Agama. Dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024 telah dijabarkan enam tujuan, yaitu :

- Peningkatan kualitas umat beragama menjalankan ibadah ritual dan sosial;
- Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
- Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
- Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari enam tujuan tersebut dua diantaranya menjadi tanggung jawab Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Tujuan tersebut adalah Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama dan kerukunan umat beragama serta Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang bersih melayani dan responsif.

B. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka pemenuhan kedua tujuan Kementerian Agama yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama 2020 - 2024 dan menjadi tanggung jawab Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, ditetapkanlah sasaran program berikut indikator kinerjanya. Dari peningkatan kualitas Moderasi Beragama dan kerukunan umat beragama yang menjadi Sasaran Program 1 (SP 1) adalah Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dengan indikator kinerjanya adalah:

- Persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan;
- Persentase manuskrip yang dimanfaatkan;
- Persentase hasil publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
- Tingkat sitasi atas publikasi;
- Produk penelitian, pengembangan dan pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Sedangkan untuk peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih melayani dan responsif, ditetapkan yang menjadi Sasaran Program 4 (SP 4) yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerjanya yaitu :

- Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan;
- Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Nilai Maturitas SPIP; dan
- Indeks Profesionalitas ASN.

Dengan adanya dua Sasaran Program berikut indikatornya, Balai Litbang Agama Makassar menguraikannya kedalam beberapa sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang dituangkan dan ditetapkan kedalam Renstra Balai Litbang Agama Makassar. Pada Sasaran Program 1 (SP 1) Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dihasilkan Sasaran Kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- Sasaran Kegiatan 1 (SK1) : Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan beserta target pertahun :

Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (2153) dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang bimas agama dan layanan keagamaan memiliki indikator:					
Jumlah penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang menghasilkan produk kebijakan (policy paper), target tahunan tahun 2020-2024	2020 2	2021 3	2022 5	2023 7	2024 9
Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan	2020 100,00%	2021 100,00%	2022 100,00%	2023 100,00%	2024 100,00%
Tingkat sitasi atas publikasi Penelitian Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	2020 500	2021 850	2022 1700	2023 2700	2024 3400
Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HaKI	2020 1	2021 3	2022 4	2023 5	2024 7
Jumlah artikel hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diikutsertakan ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
Persentase penelitian bimas agama dan layanan keagamaan yang terakreditasi di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	2020 40,00%	2021 45,00%	2022 50,00%	2023 55,00%	2024 60,00%
Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diadopsi oleh instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat	2020 100,00%	2021 100,00%	2022 100,00%	2023 100,00%	2024 100,00%

Gambar 2.2 Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

- Sasaran Kegiatan 2 (SK2) : Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, dengan indikator kinerja kegiatan:

Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (2154) dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi memiliki indikator:					
Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (2154) dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi memiliki indikator:	2020	2021	2022	2023	2024
	0	1	2	3	4
Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (2154) dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi memiliki indikator:	2020	2021	2022	2023	2024
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi	2020	2021	2022	2023	2024
	170	290	570	900	1150
Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI	2020	2021	2022	2023	2024
	0	1	2	3	4
Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
Persentase penelitian bidanglektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang termasuk publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	2020	2021	2022	2023	2024
	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	55,00%
Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang diajukan oleh instansi Kementerian Agama atau masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 2.3 Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

3. Sasaran Kegiatan 3 (SK3) : Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan :

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (2155) dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang pendidikan agama dan keagamaan memiliki indikator:					
Jumlah penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang menghasilkan produk kebijakan (policy paper), target tahun 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
	4	6	9	11	14
Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan	2020	2021	2022	2023	2024
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan	2020	2021	2022	2023	2024
	500	850	1700	2700	3400
Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	2020	2021	2022	2023	2024
	1	3	4	5	7
Jumlah artikel hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
Persentase penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang termasuk publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	2020	2021	2022	2023	2024
	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%
Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang diajukan oleh instansi Kementerian Agama atau masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Gambar 2.4 Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

4. Sasaran Kegiatan 4 (SK4) : Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang Lektur Khazanah Pendidikan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan :

Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (5311) dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang lektor dan khazanah pendidikan keagamaan memiliki indikator:					
Jumlah penelitian bidang lektor dan khazanah pendidikan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper), target 2020-2024	2020 4	2021 6	2022 8	2023 10	2024 12
Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektor dan khazanah pendidikan keagamaan	2020 100,00%	2021 100,00%	2022 100,00%	2023 100,00%	2024 100,00%
Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektor dan khazanah pendidikan keagamaan	2020 500	2021 850	2022 1700	2023 2700	2024 3400
Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektor dan khazanah pendidikan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektor dan khazanah pendidikan keagamaan yang diiklaskan ke Jurnal Internasional Terindeks Global Bereputasi	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
Persentase penelitian bidang lektor dan khazanah pendidikan keagamaan yang terakreditasi di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	2020 30,00%	2021 35,00%	2022 40,00%	2023 45,00%	2024 55,00%
Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektor dan khazanah pendidikan keagamaan yang diadopsi oleh instansi Kementerian Agama atau masyarakat	2020 100,00%	2021 100,00%	2022 100,00%	2023 100,00%	2024 100,00%

Gambar 2.5 Sasaran Kegiatan 4 (SK4)

Sedangkan untuk Sasaran Program 4 (SP4) Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel dihasilkan Sasaran Kegiatan dan indikatornya yaitu :

1. Sasaran Kegiatan 5 (SK5) : Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra, dengan indikator kinerja kegiatan :

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra, dengan indikator					
Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra, target tahun 2020-2024	2020 100%	2021 100%	2022 100%	2023 100%	2024 100%
Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar, target tahun 2020-2024	2020 4	2021 7	2022 10	2023 13	2024 16

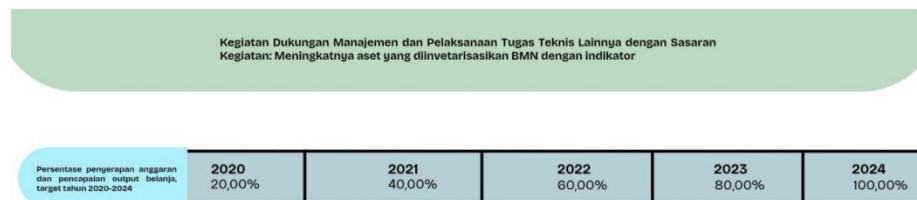
Gambar 2.6 Sasaran Kegiatan 5 (SK5)

2. Sasaran Kegiatan 6 (SK6) : Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran, dengan indikator kinerja kegiatan :

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran dengan indikator					
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, target tahun 2020-2024	2020 95,00%	2021 95,30%	2022 95,50%	2023 95,70%	2024 96,00%

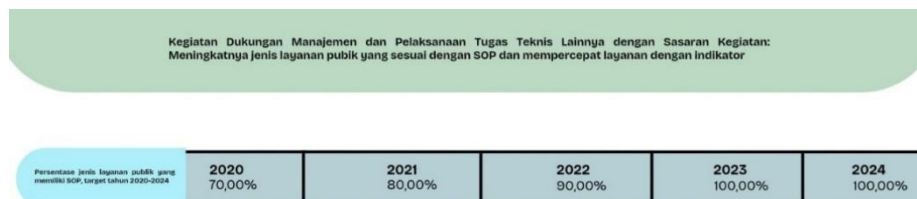
Gambar 2.7 Sasaran Kegiatan 6 (SK6)

3. Sasaran Kegiatan 7 (SK7) : Meningkatnya aset yang di inventarisasikan BMN, dengan indikator kinerja kegiatan :



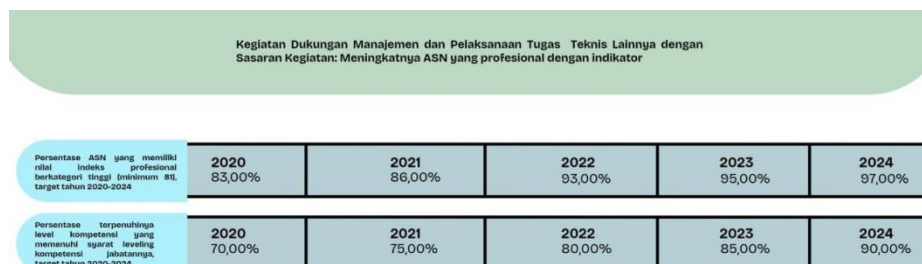
Gambar 2.8 Sasaran Kegiatan 7 (SK7)

4. Sasaran Kegiatan 8 (SK8) : Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanana, dengan indikator kinerja kegiatan :



Gambar 2.9 Sasaran Kegiatan 8 (SK8)

5. Sasaran Kegiatan 9 (SK9) : Meningkatnya ASN yang profesional, dengan indikator kinerja kegiatan:



Gambar 2.10 Sasaran Kegiatan 9 (SK9)

2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Balai Litbang Agama Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatannya. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab dan sumber data indikator kinerja sasaran kegiatan.

Adapun perumusan indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020-2024

Kegiatan/Sasaran	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan		
a	Jumlah penelitian bidang bimas	1) Penelitian bidang	Jumlah penelitian bidang bimas agama dan layanan

		agama dan layanan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)	bimas agama dan layanan keagamaan 2) Naskah kebijakan (policy paper)	keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)
	b	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan	1) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang dipublikasikan 2) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang dipublikasikan: jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan
	c	Tingkat sitasi atas publikasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	Sitasi bidang bimas agama dan layanan keagamaan pada aplikasi SINTA	Jumlah sitasi bidang bimas agama dan layanan keagamaan pada aplikasi SINTA
	d	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	HaKI	Jumlah HaKI yang diperoleh bidang bimas agama dan layanan keagamaan
	e	Jumlah artikel hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	1) Artikel hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan 2) Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	Jumlah artikel hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi
	f	Persentase penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	1) Penelitian Bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 2) Total penelitian Bidang bimas agama dan layanan keagamaan	Penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2: Total penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan
	g	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat	1) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat 2) Total Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan	Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat: Total Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan

2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang lektur khazanah keagamaan dan manajemen organisasi		
a	Jumlah penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)	1) Penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi 2) Naskah kebijakan (policy paper)	Jumlah penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)
b	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi	1) Hasil penelitian, Pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dipublikasikan 2) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dipublikasikan: jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi
c	Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi	Sitasi bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi pada aplikasi SINTA	Jumlah sitasi bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi pada aplikasi SINTA
d	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI	HaKI	Jumlah HaKI yang diperoleh bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi
e	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	1) Artikel hasil penelitian bidang lektur khazanah keagamaan dan manajemen organisasi 2) Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi
f	Persentase penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	1) Penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 2) Total penelitian bidang penelitian lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi	Penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2: Total penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi
g	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen	1) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah	Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang diakses oleh Instansi

		organisasi yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat	keagamaan dan manajemen organisasi yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat 2) Total Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi	Kementerian Lainnya atau masyarakat: Total Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang pendidikan agama dan keagamaan			
	a	Jumlah penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)	1) Penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan 2) Naskah kebijakan (policy paper)	Jumlah penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)
	b	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan	1) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang di-publikasikan 2) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang dipublikasikan: jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian
	c	Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan	Sitasi pada aplikasi SINTA	Jumlah sitasi pada aplikasi SINTA
	d	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	HaKI	Jumlah HaKI yang diperoleh
	e	Jumlah artikel hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	1) Artikel hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan 2) Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	Jumlah artikel hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi
	f	Persentase penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	1) Penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 2) Total penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan	Penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2: Total penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan
	g	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat	Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat: Total Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan

			keagamaan
4	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra		
a	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra	Kesesuaian program, kegiatan dan output	Membandingkan kesesuaian antara program/kegiatan pada dokumen RKAKL dengan Renstra
b	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	Renstra, Renja, RKAKL Pagu Anggaran, RKA- K/L Pagu Alokasi Anggaran, Perkin	Jumlah dokumen yang dihasilkan sesuai standar
5	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran		
a	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	Serapan anggaran dan capaian fisik	Rata rata serapan anggaran dan fisik
6	Meningkatnya asset yang diinventarisasikan BMN		
a	Persentase asset yang diinventarisasikan BMN	SK BMN	Jumlah SK BMN
7	Meningkatnya jenis layanan public yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan		
a	Persentase jenis layanan public yang memiliki SOP	Standar pelayanan dan SOP	Jumlah layanan public yang memiliki SOP
8	Meningkatnya ASN yang profesional		
a	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori tinggi (minimum 81)	SKP, keikutsertaan pengembangan kompetensi, hukuman disiplin	Survey Pegawai
9	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan Lektur Khazanah Pendidikan Keagamaan		
a	Jumlah penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)	1) Penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan 2) Naskah kebijakan (policy paper)	Jumlah penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)
b	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan	1) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dipublikasikan 2) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dipublikasikan: jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan
c	Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan	Sitasi pada aplikasi SINTA	Jumlah sitasi pada aplikasi SINTA
d	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	HaKI	Jumlah HaKI yang diperoleh
e	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	1) Artikel hasil penelitianbidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi

			2) Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	
f	Persentase penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		1) Penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 2) Total Penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan	Penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2: Total penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan
g	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		1) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat 2) Total Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan	Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat: Total Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan

2.4 Program dan Kegiatan Balai Litbang Agama Makassar

Untuk mencapai sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Balai Litbang Agama Makassar juga ikut melaksanakan satu program yaitu Dukungan Manajemen, dengan menetapkan 5 (lima) kegiatan sesuai sasaran kegiatan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. **Sasaran Program 1 (SP1):** Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan pengkajian. Kegiatan untuk mencapai sasaran ini yaitu :
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - d. Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Pendidikan Keagamaan;
2. **Sasaran Program 4 (SP4):** Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel. Kegiatan untuk mencapai sasaran ini yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat.

2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Litbang Agama Makassar

Arah kebijakan dan Strategi Balai Litbang Agama Makassar 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Balai Litbang Agama Makassar beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Balai Litbang Agama Makassar menjabarkan arah kebijakan dan sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian; dan
- b. Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel.

BAB III

EVALUASI TAHUN 2020-2024

3.1 Analisis Kinerja Balai Litbang Agama Makassar 2020-2024

Dalam kurun waktu 2020 - 2024, dinamika kelembagaan penelitian dan pengembangan di Indonesia mengalami perubahan signifikan yang turut berdampak langsung pada Balai Litbang Agama Makassar. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pandemi COVID-19 dan kebijakan restrukturisasi kelembagaan riset nasional.

1. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi yang mencapai puncaknya pada tahun 2021 membawa konsekuensi besar terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian lapangan yang biasanya dilakukan secara tatap muka, seperti wawancara mendalam, FGD, maupun observasi langsung, terhambat karena kebijakan pembatasan sosial.

Sebagai bentuk adaptasi, Balai Litbang Agama Makassar mengubah metode pengumpulan data dengan pendekatan daring (online) serta memperkuat studi kepustakaan. Strategi ini memungkinkan pencapaian target output secara kuantitatif, namun kualitas analisis menurun karena terbatasnya data lapangan. Hal ini terutama dirasakan pada penelitian evaluasi kebijakan dan kajian sosial keagamaan yang membutuhkan data primer secara langsung.

2. Dampak Restrukturisasi Kelembagaan Riset (BRIN)

Situasi semakin kompleks ketika terbit Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Regulasi ini mengamanatkan penyatuan seluruh unit litbang kementerian/lembaga ke dalam BRIN, termasuk peneliti yang selama ini menjadi sumber daya utama Balai Litbang Agama Makassar.

Beralihnya jabatan fungsional peneliti ke BRIN sejak 2022 menyebabkan kapasitas litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) Balai menurun drastis. Fungsi penelitian yang selama ini menjadi identitas utama Balai praktis kehilangan dukungan tenaga ahli, sementara penyesuaian organisasi di lingkungan Kementerian Agama belum segera dilakukan.

3. Perubahan Nomenklatur Kementerian Agama

Tantangan kelembagaan semakin bertambah setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengubah nomenklatur Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM).

Perubahan ini menggeser orientasi kelembagaan dari penelitian dan pengembangan menuju penguatan moderasi beragama dan kebijakan keagamaan. Namun, hingga tahun 2024, belum ada penyesuaian Renstra maupun struktur organisasi pada level unit pelaksana, termasuk Balai Litbang Agama Makassar.

Akibatnya, terjadi ketidaksinkronan antara fungsi aktual Balai dengan target kinerja yang masih merujuk pada Renstra lama.

4. Keterbatasan Anggaran dan Dampaknya

Selain perubahan struktural, tren alokasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar selama 2020-2024 relatif fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kondisi ini membatasi jangkauan wilayah penelitian, yang secara normatif meliputi seluruh provinsi di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Papua), tetapi dalam praktik hanya terfokus pada beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Keterbatasan anggaran ini menyebabkan representasi hasil penelitian tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika kehidupan keagamaan di seluruh wilayah kerja. Selain itu, penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) juga sering kali tidak selaras dengan kapasitas riil Balai, sehingga menyulitkan pengendalian dan evaluasi kinerja secara komprehensif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Balai Litbang Agama Makassar melakukan langkah-langkah adaptif, antara lain:

- Menyusun produk pengetahuan alternatif berupa policy paper dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan isu strategis Kementerian Agama.
- Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi, BRIN, dan lembaga riset masyarakat untuk menutup kekosongan tenaga peneliti.
- Melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk tetap menjaga kontribusi terhadap kebijakan publik.

Meskipun secara kuantitatif sebagian besar target kinerja dapat dipenuhi, secara kualitatif kinerja Balai Litbang Agama Makassar masih menghadapi tantangan serius. Hilangnya fungsi litbangjirap, keterbatasan SDM peneliti, penurunan anggaran, serta ketidaksesuaian dokumen perencanaan dengan fungsi aktual menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas hasil penelitian. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator di atas kertas tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas substansi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Renstra dan indikator kinerja agar lebih realistis, relevan, dan selaras dengan kondisi kelembagaan pasca perubahan struktur di Kementerian Agama.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020-2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Litbang Agama Makassar dengan realisasinya. Secara keseluruhan rerata capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020 sebesar 111,4%, tahun 2021 sebesar 92,94%, tahun 2022 sebesar 92,26%, tahun 2023 sebesar 117,52%, dan tahun 2024 sebesar 112,01%. Nilai ini merupakan rerata dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan atau rerata dari indikator yang awalnya 35 (tiga puluh lima) dikarenakan perubahan kebijakan berubah menjadi 17 (tujuh belas) indikator kinerja kegiatan. Jika dinilai secara rata-rata kinerja 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu 105,23% berada dalam predikat sangat baik.

Tingkat capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET [T], REALISASI [R], DAN CAPAIAN [C]														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)	Kuantitas	10	6	60%	6	6	100%	8	6	75%	7	17	243%	8	18	225%
	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase	100%	150%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,50%	88%
	Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang layak diajukan memperoleh HAKI	Kuantitas	1	5	500%	3	3	100%	4	4	100%	2	2	100%	2	2	100%
Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	Kuantitas	4	4	100%	3	4	133%	3	4	133%	3	4	133%	3	4	133%
Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran dan pencapaian output belanja	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	Persentase	95%	98,82%	104%	95,30%	99,87%	105%	95,50%	99,97%	105%	95,70%	99,98%	104%	96%	98,65%	103%
	Persentase aset yang diventarisasi BMN	Persentase	20%	20%	100%	40%	40%	100%	60%	60%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	Persentase	70%	0	0%	80%	84%	104%	90%	85%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimum 81)	Persentase	83%	0	0%	86%	74,75%	87%	93%	63,88%	69%	95%	92%	97%	97%	73,08%	75%
	Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	Persentase	70%	0	0%	75%	0%	0%	80%	37%	46%	85%	83%	98%	90%	87%	96%
	RERATA CAPAIAN		111,40%			92,94%			92,26%			117,52%			112,01%		

Tabel 3.1 Target Realisasi Capaian Renstra 2020 - 2024

A. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan I - IV : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian

Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024, indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini dipresentasikan dalam 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut target yang akan dicapai pada tiap tahunnya, yakni tentang Jumlah *Policy Paper* yang dimanfaatkan; tentang Persentase hasil publikasi penelitian, pengembangan dan pengkajian; tentang tingkat sitasi atas Publikasi; tentang jumlah produk hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang layak diajukan memperoleh HaKI; tentang jumlah artikel hasil penelitian yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi; tentang persentase penelitian yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2; dan tentang persentase penelitian, pengembangan dan pengkajian yang diakses oleh Instansi Kementerian lainnya atau masyarakat.

Secara normatif Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (Perkin) tahunan. Namun, kondisi ideal yang tertuang dalam Renstra tidak dapat diaplikasikan secara maksimal kedalam Perjanjian Kinerja (Perkin) karena beberapa kendala. Ketidaksinkronan dokumen pada tahun pertama (2020) dimana Perkin lahir lebih dulu dibanding Renstra, sehingga tidak merujuk pada arah strategis yang seharusnya. Setelah Renstra ditetapkan, tidak dilakukan revisi terhadap Perkin yang ada, sehingga terjadi kesenjangan baik sasaran maupun indikator.

Kondisi ini tidak berhenti disini saja, karena di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 Perkin masih mengalami ketidaksinkronan dengan dokumen induknya. Yang menjadi penyebabnya adalah Perkin lebih menyesuaikan pada kondisi anggaran tahunan dibandingkan pada arah strategis Renstra. Hal ini menyebabkan perbedaan fokus dimana Renstra berbasis sasaran dan tujuan jangka menengah sedangkan Perkin cenderung pragmatis mengikuti alokasi anggaran pada tahun berjalan. Baru pada tahun 2022 Perkin mulai menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam Renstra.

Kendala serius lainnya adanya efisiensi anggaran akibat Pandemi, dimana sebagian besar anggaran dipotong untuk mendukung kebijakan nasional penanganan

Covid-19. Hal ini menyebabkan keterbatasan capaian, baik secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan mengalami revisi teknis pelaksanaan ke dalam bentuk online (daring), efeknya tidak mampu menghasilkan data yang kaya secara kualitatif sehingga memengaruhi kedalaman analisis dan pemanfaatan hasil penelitian.

Yang menjadi puncak dari semua kejadian istimewa ini adalah hilangnya kapasitas kelembagaan akibat peralihan peneliti ke BRIN. Dampaknya beberapa indikator kinerja kegiatan terkait fungsi kelitbang sudah tidak dapat digunakan. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas hasil, penelitian dan pengkajian, hanya 3 (tiga) yang dapat dipertahankan. Ketiga indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- a. IKK 1 : Jumlah *Policy Paper* yang dimanfaatkan, dengan asumsi bahwa *Policy Paper* bukan hanya produk dari penelitian, tetapi bisa juga hasil dari analisis dan review kebijakan yang disusun oleh analis kebijakan, widyaiswara, perencana maupun jabatan fungsional diluar peneliti.
- b. IKK 2 : Persentase hasil publikasi penelitian, pengembangan dan pengkajian, juga dengan asumsi yang sama bahwa hasil dari *Policy Paper* yang terdapat pada IKK 1 juga banyak yang telah terpublikasikan.
- c. IKK 4 : Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang layak diajukan memperoleh HaKI, dengan asumsi beberapa hasil kegiatan maupun pengembangan terkait IKK 1 dan 2 layak diajukan memperoleh HaKI.

Tahun 2020 sampai dengan 2022, Balai Litbang Agama Makassar masih melakukan tugas pokok dan fungsi kelitbang. Sehingga pada tahun tersebut, beberapa produk penelitian dan pengembangan dapat diklaim sebagai indikator kinerja kegiatan. Namun kembali pada penjelasan sebelumnya, di tahun 2020 dan 2021 terdapat ketidaksinkronan antara Dokumen Perkin dan Renstra Balai Litbang Agama Makassar. Berdasarkan kondisi ini, capaian kinerja masih dapat diperoleh hasil akhirnya dengan beberapa penyesuaian walaupun tidak maksimal.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran kegiatan I - IV Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan; lektur khazanah keagamaan dan manajemen organisasi; pendidikan agama dan keagamaan serta lektur khazanah pendidikan keagamaan berada pada area sangat baik, sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Tahun 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Jumlah <i>policy paper</i> yang dimanfaatkan	39	53	120,00%
	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	100%	107,5%	107,50%
	Tingkat sitasi atas Publikasi	2.840	3.665	-

Produk penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	12	16	120,00%
Jumlah artikel hasil penelitian yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	10	7	-
Persentase penelitian yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2	40%	60%	-
Persentase penelitian, pengembangan dan pengkajian yang diakses oleh Instansi Kementerian lainnya atau masyarakat	100%	0%	-
Rerata Capaian			115,83%

“Secara keseluruhan capaian kinerja dari sasaran kegiatan I - IV adalah 115,83% berada pada area sangat baik”

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dijelaskan bahwa terdapat tujuh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Dari jumlah tersebut, hanya tiga IKK yang berstatus existing dan tetap digunakan hingga akhir periode Renstra 2024. Ketiga IKK tersebut ditandai dengan cetak merah pada tabel, dan masih relevan dengan tugas dan fungsi kelembagaan pasca transformasi organisasi.

Sementara itu, terdapat empat IKK yang dieliminasi dan hanya berlaku hingga tahun 2021. Penghentian penggunaan indikator tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya capaian, melainkan karena adanya transformasi kelembagaan yang berimplikasi langsung pada perubahan mandat Balai Litbang Agama. Dengan bergabungnya jabatan fungsional peneliti ke dalam BRIN, sejumlah indikator yang terkait langsung dengan output penelitian—seperti sitasi, publikasi di jurnal bereputasi, dan yang diakses oleh Lembaga lain—tidak lagi relevan untuk diukur pada periode berikutnya.

Sebagai konsekuensi dari perubahan ini, data capaian kinerja pada empat IKK yang dieliminasi tidak dimasukkan ke dalam penghitungan capaian Renstra 2020-2024 secara agregat. Namun, data tersebut tetap disajikan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan bahwa pada dua tahun pertama (2020-2021), Balai masih melaksanakan fungsi penelitian secara penuh dan berhasil mencapai sebagian target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, evaluasi kinerja Renstra 2020-2024 hanya berfokus pada tiga IKK existing, sementara capaian empat IKK lainnya ditempatkan sebagai catatan historis dalam masa transisi kelembagaan.

1. IKK Jumlah *Policy Paper* yang Dimanfaatkan

Untuk indikator pertama yakni “Jumlah *Policy Paper* yang Dimanfaatkan” berkaitan dengan hasil penelitian yang menjadi rumusan kebijakan (*policy paper*) dan

dimanfaatkan dalam perumusan berdasarkan target kinerja tahun 2020, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*policy paper*) ada 10 penelitian/pengembangan dan tercapai 6 bahan kebijakan (*policy paper*) atau 60%. Tahun 2021, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*policy paper*) ada 6 penelitian/pengembangan dan tercapai 6 bahan kebijakan (*policy paper*) atau 100%. Pada kinerja tahun 2022, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*policy paper*) ada 8 penelitian/pengembangan dan tercapai 6 bahan kebijakan (*policy paper*) atau 75%. Tahun 2023, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*policy paper*) ada 7 penelitian/pengembangan dan tercapai 17 bahan kebijakan (*policy paper*) atau 243%. Pada tahun 2024, Balai Litbang Keagamaan Makassar telah menghasilkan 18 *policy paper/brief* dari 8 target bahan kebijakan yang ditetapkan atau 225%.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2024 yaitu 39 naskah kebijakan (*policy paper*) maka capaian kinerja jumlah *policy paper* yang dimanfaatkan tahun 2024 sudah tercapai bahkan melampaui target (53 naskah kebijakan), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Jumlah *Policy Paper* yang Dimanfaatkan

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	10	6	8	7	8	39	sudah melampaui target Renstra 2024 (+14)
Realisasi	6	6	6	17	18	53	
%	60,00	100,00	75,00	120,00	120,00	120,00	

Evidence pencapaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada link berikut:

[Policy Paper dan Policy Brief](#)



“Policy paper disusun berdasarkan hasil sintesis dari berbagai penelitian, pengkajian, maupun studi lapangan yang relevan dengan isu strategis keagamaan. Policy paper bukan sekedar laporan penelitian, melainkan sebuah produk analisis kebijakan yang lebih ringkas, fokus, dan aplikatif”

Gambar 3.1 *Policy Paper*

a. Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun 2020 Balai Litbang Agama Makassar melakukan 6 penelitian reguler yang terbagi dalam 3 bidang kajian yaitu bimas agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan serta lektur khazanah yang menyasar 2 fungsi

baik agama maupun pendidikan. Tema penelitian pada tahun kerja 2020 merupakan implementasi dari Road Map penelitian Moderasi Beragama tahun 2020 - 2024. Tahun ini, Balai Litbang Agama Makassar melakukan pencarian data tentang moderasi beragama, guna menyokong arus utama ide moderasi beragama yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama RI sejak tahun 2019.

Hasil penelitian ini mengarah pada dua hal, *Pertama* gagasan moderasi beragama secara praktikal telah berjalan dengan baik, namun secara konsep kurang dipahami oleh masyarakat. *Kedua*, penelitian tentang moderasi beragama dari berbagai perspektif ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang membutuhkan ide moderasi sebagai cara untuk memulihkan diri dari identitas yang telah berlangsung dengan ramai dan hiruk-pikuk pasca reformasi.

Upaya penguatan moderasi beragama tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dan regulasi, melainkan juga melalui pendekatan berbasis pendidikan, masyarakat dan budaya. Sejumlah kajian dan kegiatan strategis diarahkan untuk membaca dinamika pemahaman, sikap serta praktik keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan titik tekan pada peserta didik, guru, tokoh masyarakat dan media.

Di tingkat pendidikan menengah, perspektif kebhinekaan peserta didik di Madrasah Aliyah menunjukkan bahwa generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman yang kokoh tentang nilai-nilai inklusif, toleransi, dan persaudaraan kebangsaan. Pendidikan agama di madrasah harusnya tidak hanya mengajarkan aspek kognitif, tetapi juga menanamkan kepekaan sosial dan keterampilan hidup bersama dalam perbedaan.

Sementara itu, dari **perspektif tokoh masyarakat**, pendidikan moderasi beragama dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial. Tokoh agama, adat, maupun masyarakat lokal memiliki peran sentral sebagai teladan dan mediator dalam mendorong praktik keberagaman yang moderat. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci dalam memperluas dampak program moderasi beragama.

Bagi tenaga pendidik, khususnya **guru agama di SMA dan MA**, pemahaman moderasi beragama menjadi bekal utama dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu menghadirkan ruang kelas yang inklusif, dialogis, dan adaptif terhadap keberagaman latar belakang peserta didik.

Lebih jauh, **kearifan lokal masyarakat** juga dijadikan media pembelajaran moderasi beragama. Nilai-nilai kultural seperti musyawarah, gotong royong, dan tradisi kerukunan antarumat beragama merupakan modal sosial yang bisa diintegrasikan dalam pendidikan. Pendekatan ini memperkuat relevansi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya bersifat teoritis, melainkan nyata dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, **kajian teks dan konteks naskah keagamaan** menjadi salah satu fondasi penting untuk mencegah lahirnya tafsir keagamaan yang eksklusif. Kajian kritis terhadap manuskrip, kitab klasik, maupun literatur modern memungkinkan peserta didik dan masyarakat memahami keragaman interpretasi dalam Islam

maupun agama-agama lain.

Di era digital, **media online** memainkan peran signifikan dalam pembentukan paham keagamaan siswa. Konten keagamaan yang beredar di media sosial sering kali menjadi sumber rujukan cepat bagi generasi muda. Oleh karena itu, literasi digital keagamaan menjadi sangat penting, agar siswa dapat memilah informasi yang moderat, ilmiah, dan sesuai dengan nilai kebangsaan.

Dengan demikian, rangkaian kajian dan kegiatan ini memperlihatkan bahwa penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara **multidimensi**: melalui pendidikan formal, keterlibatan tokoh masyarakat, pemanfaatan kearifan lokal, pengayaan kajian keagamaan, serta pengelolaan arus informasi digital. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi kebangsaan, mencegah polarisasi, dan menciptakan ekosistem sosial yang harmonis di tengah kebhinekaan Indonesia.



Gambar 3.2 Policy Paper Tahun 2020

b. Tahun Anggaran 2021

Moderasi beragama tidak dapat dipahami sebagai konsep tunggal yang seragam, melainkan harus diwujudkan melalui praktik nyata yang menyesuaikan konteks sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat. Upaya ini menuntut hadirnya inovasi, sensitivitas kultural, serta keberpihakan pada kelompok-kelompok yang selama ini kurang terlayani dalam ekosistem keagamaan.

Salah satu contoh penting adalah pembangunan rumah ibadat berbasis kearifan lokal, yang menegaskan bahwa harmoni antarumat beragama dapat terwujud ketika pembangunan infrastruktur keagamaan memperhatikan tradisi, budaya, dan tata nilai lokal. Hal ini selaras dengan semangat PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama sebagai landasan utama.

Di sisi lain, penguatan moderasi beragama juga terlihat pada adaptasi kultural

dan identitas Tionghoa Muslim. Pengalaman kelompok ini memperlihatkan bagaimana identitas keagamaan dan kebudayaan dapat berinteraksi secara harmonis, sekaligus memberi kontribusi bagi wajah Islam Indonesia yang inklusif dan beragam.

Pada ranah pendidikan, inovasi pembelajaran moderasi beragama melalui media kreatif menjadi langkah strategis untuk menjangkau generasi muda. Pendekatan ini menjadikan moderasi bukan sekadar materi normatif, tetapi pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan dunia peserta didik.

Selain itu, penelitian tentang toleransi beragama di kalangan Rohis (Rohani Islam) membuka perspektif baru terkait dinamika keberagamaan di sekolah. Rohis, sebagai organisasi intra sekolah yang berpengaruh, memiliki peran signifikan dalam membentuk pemahaman keagamaan generasi muda, sehingga penting dipastikan agar mereka tumbuh dalam semangat toleransi dan kebangsaan.

Moderasi beragama juga dapat digali dari sumber-sumber historis, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian manuskrip keagamaan. Manuskrip lokal tidak hanya merekam sejarah pemikiran Islam Nusantara, tetapi juga memuat kearifan dalam mengelola keberagaman yang relevan untuk menjawab tantangan masa kini.

Aspek inklusivitas menjadi semakin nyata ketika moderasi beragama menyentuh kelompok yang rentan terpinggirkan. Pelayanan pendidikan agama bagi anak difabel di madrasah dan sekolah merupakan wujud konkret bahwa moderasi harus mencakup semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Akses pendidikan agama yang setara bagi difabel bukan hanya memenuhi hak dasar, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Keseluruhan praktik baik ini menunjukkan bahwa moderasi beragama adalah gerakan yang hidup, berkembang, dan menemukan bentuknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari pembangunan rumah ibadat, penguatan identitas kultural, pendidikan kreatif, hingga pelayanan inklusif, moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, kebudayaan, dan keberagamaan dalam bingkai Indonesia yang majemuk.



Gambar 3.3 Policy Paper Tahun 2021

c. Tahun Anggaran 2022

Masih tentang moderasi beragama yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama yang diarahkan untuk memperkuat harmoni sosial, mencegah radikalisme, serta membangun kehidupan keagamaan yang inklusif di Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk, moderasi beragama bukan hanya wacana normatif, melainkan kebutuhan strategis yang harus dikelola melalui kebijakan, pendidikan, dan gerakan sosial yang berkesinambungan.

Pertama, strategi pengelolaan moderasi beragama pada PTKN menjadi sangat penting mengingat perguruan tinggi merupakan pusat lahirnya generasi intelektual muda. Melalui penguatan kurikulum, riset, serta kegiatan kemahasiswaan yang inklusif, PTKN berfungsi sebagai laboratorium moderasi beragama yang membekali mahasiswa dengan cara pandang toleran, kritis, dan solutif.

Kedua, upaya tersebut diperkuat dengan Empowering Rumah Moderasi Beragama di PTKN, yang berfungsi sebagai pusat kajian, advokasi, dan laboratorium sosial. Rumah Moderasi menjadi ruang kolaborasi antar sivitas akademika untuk merumuskan model penguatan moderasi yang aplikatif, tidak hanya untuk kampus, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Ketiga, dalam ranah kehidupan sosial, kearifan lokal sebagai resolusi terhadap konflik pembangunan rumah ibadah sebagaimana diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, menjadi salah satu instrumen efektif. Nilai-nilai lokal yang mengedepankan musyawarah, harmoni, dan gotong royong mampu menghadirkan solusi yang lebih kontekstual dibanding pendekatan hukum semata.

Keempat, di era digital, urgensi peta keagamaan berbasis transformasi digital tidak bisa diabaikan. Pemetaan ini berfungsi sebagai basis data strategis dalam membaca potensi keagamaan, titik kerentanan, dan peluang kerukunan, sekaligus menjadi instrumen pengambilan kebijakan berbasis evidence.

Kelima, pada level masyarakat, gerakan sosial dalam ekosistem kerja penguatan moderasi beragama perlu terus dikembangkan. Gerakan ini menjadi energi kolektif yang melibatkan tokoh agama, komunitas, pegiat literasi, hingga kalangan milenial dan Gen Z dalam menjaga kohesi sosial.

Keenam, penguatan peran madrasah dalam pengembangan paham moderasi beragama memiliki posisi strategis karena madrasah tidak hanya membekali peserta didik dengan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kerukunan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat berperan penting menanamkan moderasi sejak usia dini.

Dengan demikian, strategi penguatan moderasi beragama mencakup pendekatan akademik melalui PTKN, berbasis komunitas melalui madrasah, berbasis kultural melalui kearifan lokal, berbasis digital melalui peta keagamaan, dan berbasis sosial melalui gerakan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem moderasi beragama secara berkelanjutan dan kontekstual sesuai dinamika bangsa Indonesia yang majemuk.



Gambar 3.4 Policy Paper Tahun 2022

d. Tahun Anggaran 2023

Pada tahun berjalan, capaian penyusunan naskah kebijakan mengalami peningkatan signifikan. Dari target awal sebanyak 7 naskah kebijakan, berhasil direalisasikan 17 *Policy Paper* yang berfokus pada tema moderasi beragama serta isu-isu strategis terkait program prioritas Menteri Agama. Peningkatan ini tidak lepas dari kebijakan Kepala BMBPSDM yang baru, yang menegaskan pentingnya keterkaitan langsung setiap kegiatan dengan program prioritas Menteri Agama serta menghasilkan output yang bermanfaat dan terukur.

Peran kepemimpinan yang kuat terlihat dari keterlibatan langsung Kepala Badan dalam memonitoring setiap tahapan kegiatan, baik dari sisi substansi maupun

penggunaan anggaran. Pengawasan yang detail ini memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai tujuan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata. Kegiatan penguatan MB dilaksanakan secara menyeluruh, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan, komunitas keagamaan, hingga masyarakat umum di luar Kementerian Agama.

Dari 17 *Policy Paper* yang dihasilkan, sebagian besar merupakan turunan langsung dari program prioritas penguatan moderasi beragama yang diimplementasikan melalui sosialisasi, diseminasi, asistensi, advokasi dan orientasi. Dalam konteks revitalisasi layanan keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi garda terdepan. Melalui program *Revitalisasi KUA* layanan keagamaan diarahkan tidak hanya pada pelayanan administratif, tetapi juga sebagai pusat edukasi, konsultasi, dan pembinaan umat berbasis moderasi beragama. Hal ini diperkuat dengan pemetaan keagamaan (religiosity mapping) yang menyediakan basis data bagi pengambilan keputusan strategis, sekaligus mendeteksi potensi konflik maupun titik-titik kerukunan.

Di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan, penguatan moderasi beragama dilakukan melalui Rumah Moderasi Beragama (RMB) di PTKN. Asistensi dan advokasi kelembagaan ini penting agar RMB berfungsi optimal sebagai pusat literasi, riset, dan kaderisasi mahasiswa yang berwawasan moderat. Sementara itu, madrasah juga berperan krusial dalam menanamkan nilai moderasi beragama sejak dini, terutama untuk membentuk generasi pelajar yang toleran dan berkarakter kebangsaan.

Generasi muda, khususnya Generasi Z, merupakan sasaran strategis. Program Festival Musik Moderasi Beragama menjadi media kreatif yang relevan dengan dunia anak muda sehingga nilai toleransi dan keberagaman dapat dikomunikasikan dengan cara yang segar dan inklusif. Demikian pula, program Penguatan Moderasi Beragama di kalangan Generasi Z mendorong lahirnya agen-agen perubahan di era digital.

Pada aspek regulasi, Sosialisasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menjadi langkah penting untuk memastikan pemahaman kebijakan ini menjangkau ASN dan masyarakat luas. Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui Orientasi Moderasi Beragama, Pelatihan Moderasi Beragama bagi ASN serta pengembangan Smart ASN di lingkungan wilayah kerja Balai Litbang Agama Makassar, sehingga tercipta birokrasi yang profesional, adaptif dan berkarakter moderat.

Upaya penguatan moderasi beragama juga ditopang oleh riset dan pengembangan ilmu keagamaan. Misalnya melalui asistensi penyusunan fiqhi bunuh diri, yang menunjukkan respon akademik terhadap isu-isu kontemporer keagamaan. Selain itu, evaluasi dan pengembangan ekosistem moderasi beragama menjadi penting agar seluruh program tetap adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan global.

Pada akhirnya, keseluruhan inisiatif ini bermuara pada satu tujuan besar: membangun kerukunan umat beragama dan menjaga keragaman bangsa. Moderasi beragama tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga gerakan kolektif yang melibatkan perguruan tinggi, madrasah, ASN, generasi muda dan masyarakat luas untuk memperkuat fondasi kehidupan beragama dan bernegara.



Gambar 3.5 Policy Paper Tahun 2023

e. Tahun Anggaran 2024

Pada akhir periode Renstra 2020 - 2024, berbagai inovasi dilakukan pada kegiatan yang didasarkan pada program prioritas Kementerian Agama. Masih terkait penguatan moderasi beragama (MB) yang ditujukan untuk memperkokoh harmoni sosial, mencegah polarisasi, dan memperkuat identitas kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk. Sejalan dengan amanat RPJMN 2020 - 2024, berbagai strategis telah dirumuskan dan diimplementasikan melalui program yang menysasar lintas sektor pendidikan, kelembagaan serta komunitas masyarakat.

Di tahun ini, ada 18 naskah kebijakan yang dihasilkan dari beberapa kegiatan unggulan yang telah dirancang dan direncanakan di tahun sebelumnya. Di bidang pendidikan, advokasi pengembangan moderasi beragama dilakukan di madrasah dan SMA, yang dipandang sebagai ruang strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Program ini diperkuat dengan orientasi Moderasi Beragama bagi guru dan dosen, serta penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) dan capacity building bagi fasilitator Moderasi Beragama, yang bertujuan mencetak agen-agen penggerak moderasi di lingkungan pendidikan. Untuk memperluas jangkauan, program short course Moderasi Beragama juga dilaksanakan sebagai bentuk pelatihan intensif dan tematik.

Pada level masyarakat, kampanye Moderasi Beragama dilakukan secara masif melalui media digital dan online, menjawab tantangan era disrupsi informasi. Selain itu gerakan MB juga didiseminasikan ke berbagai komunitas, seperti kampus, seniman dan pegiat literasi, untuk memperluas ekosistem MB berbasis kebudayaan dan kreativitas. Kelembagaan keagamaan menjadi fokus tersendiri melalui advokasi pengembangan ekosistem MB berbasis KUA, sebagai institusi pelayanan publik terdepan, KUA dipandang strategis dalam memperkuat praktik moderasi di tingkat akar rumput. Hal ini didukung dengan evaluasi berbasis wilayah, seperti evaluasi Kampung Moderasi Beragama, yang menjadi laboratorium sosial penguatan kerukunan.

Tidak hanya itu, Balai Litbang Agama Makassar juga menggagas program inovatif yang merupakan pengembangan dari tahun sebelumnya berupa Moderasi Beragama mencari Bintang, sebuah gerakan kampanye kreatif untuk menjaring dan menumbuhkan duta MB dari kalangan muda. Sementara itu, kalangan akademisi, diseminasi MB dikalangan Guru Besar memperlihatkan komitmen bahwa penguatan nilai moderasi harus hadir di tingkat tertinggi pendidikan.

Keseluruhan program ini diperkuat oleh instrumen Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan di beberapa wilayah kerja berdasarkan perjanjian kerja sama, yang menjadi tolok ukur empiris dalam menilai capaian dan efektivitas implementasi moderasi beragama di berbagai wilayah Indonesia. Dengan pendekatan yang multi-level--mulai dari sekolah, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, komunitas seni hingga dunia digital--ekosistem moderasi beragama diharapkan semakin kokoh, adaptif dan berkelanjutan.



Gambar 3.6 Policy Paper Tahun 2024

2. IKK Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

Secara umum, dalam periode lima tahun, Balai Litbang Agama Makassar menunjukkan capaian publikasi penelitian yang relatif stabil dengan mayoritas realisasi berada pada angka 100% dari target yang ditetapkan. Tahun 2020 menjadi periode yang unik sekaligus penuh tantangan karena pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Pembatasan sosial membuat sebagian besar aktivitas penelitian lapangan tidak dapat dilakukan secara normal. Namun, kondisi ini justru melahirkan inovasi dalam metode penelitian dan publikasi.

- Balai Litbang Agama Makassar beradaptasi dengan memaksimalkan studi kepustakaan, penelitian daring, serta publikasi melalui media online.
- Dampaknya, jumlah publikasi yang dihasilkan melampaui target yang ditetapkan, mencapai 150%.
- Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keterbatasan, lembaga mampu mengoptimalkan teknologi digital untuk memperkuat produktivitas publikasi.

Memasuki tahun 2021 hingga 2023, kinerja publikasi Balai menunjukkan stabilitas yang konsisten dengan capaian sesuai target (100%).

- Stabilitas ini menandakan adanya penguatan manajemen riset dan publikasi yang terukur, serta kemampuan lembaga dalam menjaga kualitas dan kuantitas keluaran penelitian.
- Namun, capaian yang hanya “tepat 100%” juga dapat menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam meningkatkan capaian lebih tinggi, kemungkinan karena:
 - Keterbatasan SDM akibat peralihan jabatan fungsional peneliti ke BRIN.
 - Kebijakan restrukturisasi kelembagaan yang menyebabkan ketidakpastian fungsi litbang.
 - Alokasi anggaran yang terbatas karena sebagian diarahkan pada prioritas nasional lainnya.

Tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan kinerja publikasi menjadi 88% dari target.

- Faktor utama penurunan ini dapat ditelusuri dari implikasi restrukturisasi kelembagaan pasca Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 dan Nomor 152 Tahun 2024 yang mengubah nomenklatur Badan Litbang dan Diklat menjadi BMBPSDM.
- Perubahan ini membuat peran penelitian menjadi semakin berkurang, sementara orientasi kelembagaan beralih pada penguatan moderasi beragama dan pengembangan SDM keagamaan.
- Keterbatasan sumber daya peneliti juga semakin terasa, sehingga capaian publikasi tidak lagi sekuat tahun-tahun sebelumnya.

Capaian tinggi di tahun 2020 menunjukkan kemampuan adaptasi lembaga dalam menghadapi situasi krisis. Inovasi metode riset dan pemanfaatan teknologi digital perlu dijadikan best practice yang berkelanjutan. Stabilitas capaian 2021-2023 memperlihatkan adanya sistem manajemen yang solid, namun juga menunjukkan potensi stagnasi yang harus diantisipasi dengan mendorong variasi publikasi ke jurnal internasional atau bereputasi global. Penurunan di tahun 2024 menjadi peringatan bahwa tanpa restrukturisasi strategi dan penguatan sumber daya manusia, capaian publikasi berisiko menurun di masa depan.

Kinerja publikasi hasil penelitian Balai Litbang Agama Makassar dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dikatakan sangat baik secara kuantitatif, namun terdapat indikasi penurunan di akhir periode yang mencerminkan tantangan keberlanjutan kelembagaan pasca restrukturisasi.

Untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan, ke depan perlu strategi penguatan kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga riset independen, serta penguatan kapasitas SDM non-peneliti agar tetap mampu menghasilkan publikasi berkualitas meskipun fungsi kelembagaan berubah.

Hasil publikasi telah dilakukan pada semua produk penelitian, pengembangan dan pengkajian melalui media sosial yang dimiliki oleh Balai Litbang Agama Makassar, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok dan Website.

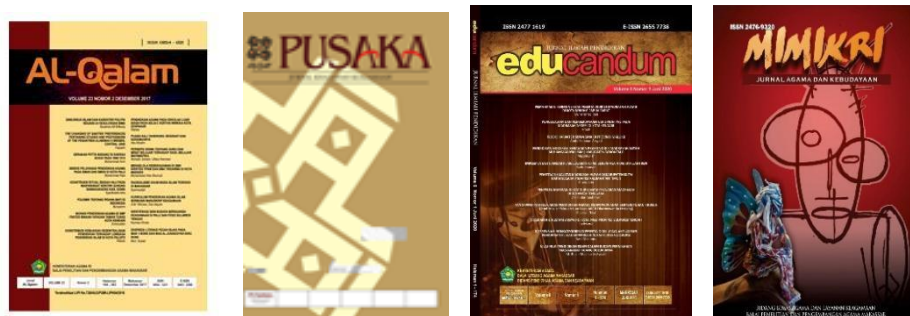
Selain itu, bentuk publikasi juga dilakukan melalui jurnal yang ada pada Balai Litbang Agama Makassar yaitu jurnal Al-Qalam, Pusaka, Educandum dan Mimikri. Capaian kinerja tahun 2024 untuk publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Persentase Publikasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sudah melampaui target Renstra 2024 (+7,5%)
Realisasi	150%	100%	100%	100%	87,5%	107,5%	
%	120,00	100,00	100,00	100,00	87,50	107,50	

Evidence pencapaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada *link* berikut:

1. <https://www.facebook.com/balailitbang.agamamakassar.5>
2. https://www.instagram.com/bla_makassar
3. <https://x.com/BLAMakassar>
4. <https://www.tiktok.com/@bla.makassar>
5. <https://www.youtube.com/@blamnewsofficial2999>
6. <https://blamakassar.web.id>
7. <https://jurnalalqalam.or.id>
8. <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka>
9. <https://blamakassar.e-journal.id/educandum>
10. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri>



Gambar 3.7 Jurnal pada Balai Litbang Agama Makassar



Gambar 3.8 Jurnal Al-Qalam

3. IKK Jumlah Produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang layak diajukan memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)

Pada awal periode Renstra, target indikator ini cukup ambisius, karena mengandaikan setiap tahun ada sejumlah produk yang siap diajukan HaKI. Hal tersebut terbukti dengan capaian di tahun 2020 yang 5 kali lebih besar dari target yang diberikan. Namun, dalam praktiknya, pandemi Covid-19 serta alih fungsi kelembagaan akibat BRIN menyebabkan terbatasnya kapasitas riset lapangan. Akibatnya, produk yang benar-benar inovatif dan memenuhi kriteria HaKI relatif sedikit. Sebagian besar karya yang masih dapat diajukan sebagai HaKI adalah berupa hak cipta (misalnya buku hasil penelitian, modul pembelajaran, atau policy paper inovatif). Untuk paten atau paten sederhana, nyaris sulit dicapai karena riset sosial-keagamaan lebih banyak menghasilkan kajian konseptual daripada produk teknologis.

Produk penelitian, pengembangan dan pengkajian yang memperoleh HaKI dari target tahun 2024 sebesar 12 HaKI, terealisasi 16 HaKI, sehingga capaian kinerjanya 120%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	1	3	4	2	2	12	Akumulasi Capaian 16 HaKI, sudah melampaui target Renstra 2024 (+4 HaKI)
Realisasi	5	3	4	2	2	16	
%	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	

Produk Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian yang telah memperoleh HaKI tersebut yaitu:

Tahun Anggaran 2020:

1. Sekolah Langit
2. Modul Islam Nusantara
3. Riset Sederhana
4. Pendekatan Pendidikan Agama terhadap Pencegahan Radikalisme di Sekolah
5. Pendidikan Budaya Damai ; 101 Cara Menghentikan Perundungan (Bullying) di Sekolah

Tahun Anggaran 2021:

1. Transliterasi dan Terjemahan Naskah Tarekaq Assapareng Dalleq
2. Ulama Perempuan dan Kesetaraan Gender; Kiprah Ulama Perempuan Indonesia Timur dalam Lintasan Zaman
3. Transliterasi dan Terjemahan Naskah Makkaterekna Nabiyya

Tahun Anggaran 2022:

1. MODERASI BERAGAMA ; Konsep, Praktik dan Kritik
2. Metode Penelitian Kebijakan Bidang Agama
3. Transliterasi dan Terjemahan Naskah Fiqih
4. Transliterasi dan Terjemahan Naskah Kutika

Tahun Anggaran 2023:

1. SI EDI (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi)
2. SIPATTUJU (Sistem Informasi Pelaporan Teratur dan Jitu)

Tahun Anggaran 2024:

1. Gerakan Sosial Dan Keagamaan Mahasiswa
2. Model Pendidikan Karakter di Lembaga Pendidikan Formal Melalui Sekolah Perjumpaan

Evidence pencapaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada *link* berikut:

[HaKI \(Hak atas Kekayaan Intelektual\)](#)



Gambar 3.9 HaKI Produk Balai Litbang Agama Makassar

Evaluasi Akumulasi Capaian IKK

Secara keseluruhan, akumulasi dari tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang masih digunakan hingga 2024, yakni:

1. Jumlah Policy Paper yang Dimanfaatkan,
2. Persentase Publikasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian, dan
3. Jumlah Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI),

menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dengan skor kinerja mencapai 115,83%.

IKK terkait Policy Paper yang dimanfaatkan menunjukkan kontribusi strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan. Policy paper menjadi instrumen yang menyajikan rumusan alternatif kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan, sehingga dapat digunakan oleh stakeholders maupun pimpinan dalam merespons isu-isu aktual keagamaan. Pemanfaatan hasil penelitian juga dilakukan secara luas kepada stakeholders maupun masyarakat melalui berbagai kanal digital. Sejak tahun 2019, Balai Litbang Agama Makassar telah memiliki akun-akun media sosial dan aktif dalam pemanfaatannya.

Pada 2021-2022, indikator HaKI menunjukkan adanya pengakuan kualitas hasil penelitian dan pengembangan melalui perlindungan hak cipta. Hal ini tidak hanya menegaskan orisinalitas karya penelitian, tetapi juga memperkuat legitimasi produk litbang dalam ekosistem inovasi kebijakan. Meskipun capaian kinerja tergolong sangat baik, masih terdapat kebutuhan penguatan di beberapa aspek, yakni:

- Relevansi antara hasil penelitian yang dituangkan dalam policy paper dengan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang ditawarkan, baik pada tataran regulasi maupun aspek teknis implementasi.
- Pengembangan data center dan digitalisasi policy paper/policy brief hasil litbang atau survei agar lebih mudah diakses oleh pimpinan dan stakeholders lintas unit kerja di Kementerian Agama.
- Penetapan peta prioritas rekomendasi oleh pimpinan secara berkala sehingga hasil penelitian tidak hanya menjadi dokumen referensi, tetapi juga dapat ditindaklanjuti menjadi program berkelanjutan.

B. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan V - IX: Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

Secara umum, capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan V - IX: Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dapat digambarkan melalui tiga aspek utama, yaitu efektivitas dukungan manajemen, efisiensi pelaksanaan program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Pertama, dari sisi efektivitas dukungan manajemen, capaian ditunjukkan dengan semakin lancarnya proses penyusunan berbagai dokumen perencanaan strategis maupun teknis, seperti Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Perkin), serta RKA-KL. Penyusunan dokumen tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap prinsip perencanaan berbasis kinerja. Selain itu, indikator terkait keselarasan antara perencanaan program dan alokasi anggaran dengan arah strategis Renstra dapat tercapai dengan baik, sehingga setiap program

dan kegiatan tetap memiliki keterkaitan dengan sasaran jangka menengah organisasi.

Kedua, dari aspek efisiensi pelaksanaan program dan anggaran, efektivitas penggunaan sumber daya keuangan tercermin pada tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi, tanpa mengurangi kualitas output kegiatan. Meskipun terjadi kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, unit kerja mampu melakukan berbagai penyesuaian sehingga kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dengan sasaran strategis. Penyesuaian tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi manajerial dalam menjaga kesinambungan program, walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Ketiga, dari segi akuntabilitas kinerja dan keuangan, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam kualitas pelaporan kinerja, baik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan keuangan, maupun laporan evaluasi Renstra. Seluruh laporan telah disusun dengan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi standar yang ditetapkan. Peningkatan nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diperoleh Badan Litbang dan Diklat menjadi bukti nyata bahwa aspek akuntabilitas kinerja terus mengalami penguatan dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, capaian pada Sasaran Kegiatan V - IX menunjukkan bahwa dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya telah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran dan dinamika kebijakan nasional.

Meskipun capaian kinerja Sasaran Kegiatan V - IX menunjukkan hasil yang cukup baik, dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala. Pertama, terjadi ketidaksinkronan antara dokumen Renstra dengan Perjanjian Kinerja (Perkin) pada tahun awal pelaksanaan, karena dokumen Perkin lahir lebih dahulu daripada Renstra, sehingga target kinerja tidak sepenuhnya selaras dengan arah strategis. Kedua, kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa program harus dialihkan atau bahkan ditunda, sehingga kualitas capaian kegiatan di lapangan tidak seoptimal yang direncanakan. Ketiga, masih terdapat keterbatasan kapasitas SDM di bidang perencanaan dan pelaporan, yang berimplikasi pada variasi kualitas dokumen perencanaan antar tahun. Selain itu, dinamika perubahan struktur kelembagaan turut berpengaruh terhadap konsistensi penyusunan dokumen perencanaan, karena penyesuaian fungsi belum selalu diikuti dengan pembaruan dokumen Renstra dan turunan perencanaan lainnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sejumlah langkah perbaikan strategis. Pertama, peningkatan koordinasi internal dalam proses perencanaan dan penyusunan dokumen kinerja, agar sinkronisasi antara Renstra, RKT, Perkin, dan RKA-KL dapat terjaga sejak awal. Kedua, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM perencana dan pengelola kinerja melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta asistensi dari unit perencana di tingkat pusat, sehingga kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan semakin meningkat. Ketiga, diperlukan penataan ulang prioritas program dan kegiatan agar tetap sejalan dengan arah kebijakan strategis Kementerian Agama, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Keempat,

pemanfaatan sistem digitalisasi perencanaan dan pelaporan (e-planning, e-monev, dan aplikasi kinerja lainnya) perlu diperluas untuk meminimalisasi inkonsistensi data dan memudahkan proses monitoring serta evaluasi kinerja. Terakhir, perlu adanya peninjauan ulang dan penyesuaian Renstra maupun dokumen turunan lainnya setiap kali terjadi perubahan kelembagaan atau regulasi, sehingga tidak terjadi lagi ketidaksinkronan antara target dengan pelaksanaan.

Dengan strategi perbaikan tersebut, diharapkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Balai Litbang Agama Makassar dapat semakin efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian Sasaran Program Badan Litbang dan Diklat yang merujuk pada Visi Misi Kementerian Agama. Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada area Dukungan Manajemen dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian Perjanjian Kinerja Area Dukungan Manajemen 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	100%	100%	100,00%
	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	16	20	120,00%
Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	96%	99,46	103,60%
Meningkatnya aset yang diinventarisasikan BMN	Persentase aset yang diinventarisasikan BMN	100%	100%	100,00%
Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	100%	100%	100,00%
Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimum 81)	97%	60,74%	66%
	Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	90%	41,4%	48%
Rerata Capaian Kinerja				91,09%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area dukungan manajemen adalah 91,09% berada pada area baik”

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra

Sasaran ini menitikberatkan pada keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan arah strategis Renstra. Capaian ditunjukkan melalui peningkatan persentase keselarasan perencanaan program dengan Renstra serta

jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar. Walaupun pada awal periode terdapat kendala sinkronisasi antara Perkin dengan Renstra, perbaikan dilakukan secara bertahap sehingga kualitas perencanaan semakin membaik.

Capaian sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra mencapai 100%, sesuai dengan target. Bahkan pada indikator jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar, realisasi mencapai 20 dokumen dari target 16 dokumen (120%). Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas perencanaan sekaligus menunjukkan kesungguhan unit kerja dalam memastikan sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai arah strategis.

1. IKK Persentase Keselarasan Perencanaan Program dan Anggaran Sesuai Renstra

Indikator persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas perencanaan dan penganggaran organisasi. Pada tahun evaluasi, capaian indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Artinya, seluruh dokumen perencanaan program dan penganggaran yang disusun oleh Balai Litbang Agama Makassar telah sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan strategi yang tertuang dalam dokumen Renstra 2020-2024.

Capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknis dalam penyusunan dokumen, tetapi juga mencerminkan adanya konsistensi kebijakan serta kedisiplinan dalam menjalankan siklus perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan yang dilakukan telah mengacu pada prinsip *planning by design*, yakni seluruh program dan kegiatan dirancang berdasarkan prioritas strategis yang sudah ditetapkan, sehingga mampu menjamin kesinambungan antara visi, misi, sasaran strategis, hingga implementasi pada level kegiatan.

Dari sisi implementasi, keselarasan ini terlihat jelas pada hubungan antara dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Semua dokumen tersebut disusun secara berjenjang dan konsisten mengacu pada dokumen induk Renstra. Dengan demikian, arah pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan pelayanan informasi keagamaan dapat terukur dan sejalan dengan tujuan jangka menengah organisasi.

Pencapaian 100% ini juga menandakan adanya penguatan tata kelola perencanaan dan koordinasi lintas bagian, baik dalam proses pengumpulan data, penyusunan program, maupun penetapan anggaran. Hal ini penting karena tanpa adanya sinkronisasi yang baik, akan sulit bagi unit kerja untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Lebih jauh, capaian ini memberi jaminan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan memiliki legitimasi strategis serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan keagamaan. Dengan kata lain, indikator ini menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar diarahkan untuk mendukung target strategis organisasi, bukan sekadar kegiatan rutin tanpa orientasi pada hasil jangka panjang.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran dengan Renstra

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dari target Renstra 2024, sudah tercapai
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2. IKK Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai standar

Selain keselarasan perencanaan dengan dokumen Renstra, indikator lain yang menjadi tolok ukur adalah **jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun sesuai standar**. Pada tahun evaluasi, capaian indikator ini bahkan melampaui target yang ditetapkan. Jika target awal berjumlah **16 dokumen**, realisasi penyusunan mencapai **20 dokumen**, sehingga capaian kinerjanya setara dengan **120%**.

Kelebihan capaian ini menggambarkan bahwa Balai Litbang Agama Makassar tidak hanya konsisten memenuhi standar perencanaan yang berlaku, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi. Hal ini antara lain terlihat dari adanya penguatan tata kelola perencanaan yang mendorong lahirnya dokumen tambahan di luar target, baik berupa dokumen teknis pendukung maupun laporan hasil evaluasi yang memperkuat akuntabilitas kinerja.

Dari sisi kualitas, dokumen-dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada standar perencanaan yang ditetapkan Kementerian Agama dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Hal ini meliputi pemenuhan aspek *logical framework*, keterkaitan indikator kinerja dengan output, serta pencantuman rencana kebutuhan anggaran yang rasional dan terukur. Dengan demikian, dokumen perencanaan tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen manajerial yang mendukung pengambilan keputusan strategis.

Capaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan budaya kerja organisasi yang lebih proaktif. Unit kerja tidak hanya menunggu arahan dari pusat, tetapi juga mampu melakukan inisiatif dalam penyusunan dokumen tambahan yang relevan dengan kebutuhan pengendalian kinerja. Dengan adanya dokumen yang lebih lengkap dan terstandar, proses monitoring dan evaluasi kinerja dapat berjalan lebih sistematis serta menghasilkan data dan informasi yang lebih valid.

Lebih jauh, kelebihan capaian pada indikator ini menjadi bukti bahwa Balai Litbang Agama Makassar mampu menjaga komitmen terhadap prinsip **good governance** dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan program. Kondisi ini pada akhirnya akan memperkuat akuntabilitas publik, sekaligus menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan perencanaan yang semakin kompleks di masa mendatang.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai standar

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	4	3	3	3	3	16	Dari target Renstra 2024, sudah tercapai (+20%)
Realisasi	4	4	4	4	4	20	
%	100%	120%	120%	120%	120%	116%	

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran

Sasaran ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program. Tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi, disertai dengan upaya menjaga kualitas output, menjadi indikator keberhasilan. Meskipun terdapat kebijakan refocusing akibat pandemi Covid-19, unit kerja mampu menyesuaikan program agar tetap relevan dengan sasaran strategis.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terlihat dari indikator persentase penyerapan anggaran yang mencapai 99,46% dari target 96%, atau setara dengan capaian kinerja 103,60%. Hasil ini menandakan adanya tata kelola anggaran yang semakin baik, diiringi dengan optimalisasi pencapaian output belanja, meskipun dalam situasi yang masih dipengaruhi dampak pandemi dan kebijakan refocusing.

3. IKK Persentase Penyerapan Anggaran dan pencapaian output belanja

Pada tahun evaluasi, indikator **persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja** menunjukkan capaian **99,46%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **96%**. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran di Balai Litbang Agama Makassar yang mampu menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Tingkat penyerapan yang tinggi juga menjadi bukti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan prioritas strategis yang tertuang dalam Renstra.

Selain itu, capaian ini juga menunjukkan adanya sinkronisasi yang baik antara perencanaan dan pelaksanaan, di mana setiap belanja yang dikeluarkan berorientasi pada pencapaian output yang relevan dengan sasaran program. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan efektivitas serapan anggaran, tetapi juga menunjukkan bahwa output yang dihasilkan memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja.

Beberapa kendala yang dihadapi selama 5 tahun Renstra adalah kebijakan refocusing anggaran pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan penelitian harus mengalami penyesuaian skala dan metode, sehingga meskipun serapan tinggi, kualitas data lapangan relatif terbatas. Fluktuasi pagu anggaran yang bersifat dinamis setiap tahun menuntut penyesuaian cepat dalam perencanaan, yang kadang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun. Orientasi serapan anggaran yang tinggi kadang menimbulkan risiko fokus pada “kuantitas” serapan, bukan pada mutu output yang dihasilkan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain penguatan kualitas perencanaan anggaran, khususnya dalam menyusun RKA-KL agar lebih fleksibel namun tetap fokus pada target Renstra. Diversifikasi metode pelaksanaan kegiatan, misalnya kombinasi daring dan luring, agar meskipun ada refocusing, kualitas data dan output tetap terjaga. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, agar penyerapan anggaran tidak hanya dinilai dari sisi kuantitas, tetapi juga berdampak pada kualitas program dan relevansi terhadap isu strategis keagamaan. Optimalisasi teknologi digital untuk mendukung transparansi, percepatan administrasi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Persentase Penyerapan Anggaran dan Capaian Output

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	95%	95,3%	95,5%	95,7%	96%	95,5%	Dari target Renstra 2024, sudah tercapai (+7%)
Realisasi	98,82%	99,87%	99,97%	99,98%	98,65%	99,46%	
%	104%	105%	105%	104%	103%	104,2%	

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya aset yang diinventarisasikan BMN

Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN), terutama dari aspek inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset. Upaya peningkatan dilakukan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN, validasi data aset secara berkala, serta audit internal. Hasilnya menunjukkan perbaikan dalam tertib administrasi dan transparansi pengelolaan BMN, meskipun masih ditemui kendala dalam pemutakhiran data dan koordinasi lintas unit.

Sasaran ini juga berhasil tercapai penuh. Persentase aset yang diinventarisasikan BMN mencapai 100%, sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketertiban administrasi dan transparansi dalam pengelolaan aset negara melalui sistem inventarisasi dan validasi data yang semakin akurat.

4. IKK Persentase Aset yang diinventarisasikan BMN

Indikator Persentase Aset yang diinventarisasikan BMN bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam melakukan pencatatan, pendataan, serta pengelolaan seluruh Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan BMN yang baik merupakan salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, karena aset yang dikuasai pemerintah harus dipastikan tercatat, terdokumentasi, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada tahun pelaporan, capaian indikator ini menunjukkan hasil 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh BMN yang dimiliki telah diinventarisasi dan tercatat dalam sistem administrasi pengelolaan BMN, termasuk melalui aplikasi SIMAK-BMN/SAKTI. Capaian ini sekaligus mengindikasikan bahwa unit kerja telah berhasil menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan aset negara.

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil maksimal, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Di

antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan BMN, serta adanya dinamika terkait perubahan data BMN yang memerlukan proses pembaruan secara terus-menerus. Selain itu, pemanfaatan aset secara optimal juga masih menjadi tantangan agar aset tidak hanya tercatat tetapi juga benar-benar mendukung efektivitas kinerja.

Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan kapasitas SDM pengelola BMN melalui pelatihan maupun asistensi teknis.
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIMAK-BMN/SAKTI untuk menjamin keakuratan dan ketepatan waktu pencatatan.
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi fisik dan pemanfaatan aset untuk mencegah idle asset atau aset tidak produktif.
4. Koordinasi lintas unit kerja agar data BMN selalu sinkron dengan laporan keuangan serta dokumen perencanaan.

Dengan capaian 100% ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMN telah berjalan sesuai target. Namun, upaya perbaikan tetap perlu dilakukan agar ke depan tidak hanya sebatas inventarisasi, tetapi juga pengelolaan dan pemanfaatan aset negara yang lebih efisien, efektif, dan berdaya guna bagi pencapaian sasaran strategis organisasi.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Persentase Aset yang diinventarisasikan BMN

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dari target Renstra 2024, sudah tercapai
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan

Sasaran ini ditujukan untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), sekaligus lebih cepat, mudah, dan transparan. Capaian ditunjukkan dengan adanya inovasi layanan berbasis digital, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Kendati demikian, masih terdapat kebutuhan untuk memperluas akses layanan berbasis teknologi agar menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara merata.

Indikator persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP tercapai 100% dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh jenis layanan publik sudah memiliki standar prosedur yang jelas, menjadi dasar bagi percepatan, penyederhanaan, dan peningkatan kualitas layanan.

5. IKK Persentase Jenis Layanan Publik yang memiliki SOP

Indikator Persentase Jenis Layanan Publik yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan oleh unit kerja dilaksanakan berdasarkan standar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan SOP menjadi acuan utama dalam menjaga konsistensi, transparansi, dan kualitas layanan publik, sekaligus menjadi tolok ukur dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun pelaporan, capaian indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh jenis layanan publik yang diberikan telah memiliki SOP yang baku. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memperlihatkan komitmen organisasi untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan penting. Pertama, keberadaan SOP perlu selalu diperbarui sesuai perkembangan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, pemahaman dan kepatuhan pelaksana layanan terhadap SOP juga harus terus ditingkatkan, agar SOP tidak hanya sebatas dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan layanan sehari-hari. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan review dan revisi berkala SOP agar tetap relevan dengan perubahan kebijakan dan dinamika kebutuhan masyarakat.
2. Mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan bagi pegawai untuk memastikan pelaksanaan SOP berjalan optimal.
3. Monitoring dan evaluasi kualitas layanan publik secara rutin guna mengukur efektivitas penerapan SOP.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi SOP untuk mempercepat proses layanan sekaligus meningkatkan akurasi.

Dengan capaian 100% ini, unit kerja dapat memastikan bahwa penyelenggaraan layanan publik telah memiliki dasar standar yang kuat. Ke depan, fokus utama bukan lagi pada ketersediaan SOP, melainkan pada konsistensi penerapan serta inovasi dalam pelayanan publik agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.

Tabel 3.11 Capaian Indikator Persentase Jenis Layanan Publik yang memiliki SOP

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	70%	80%	90%	100%	100%	88%	Dari target Renstra 2024, sudah tercapai
Realisasi	-	84%	85%	100%	100%	73,8%	
%	-	105%	94,4%	100%	100%	83,86%	

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya ASN yang profesional

Sasaran ini diarahkan untuk membentuk aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Upaya dilakukan melalui berbagai pelatihan, pengembangan kompetensi, serta implementasi manajemen kinerja ASN. Seiring dengan perubahan kelembagaan, penguatan peran ASN menjadi prioritas agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru, termasuk transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sasaran ini masih menghadapi tantangan besar. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi baru mencapai 60,74% dari target 97% (capaian 66%). Demikian juga, persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya hanya 41,4% dari target 90% (capaian 48%). Capaian yang rendah ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN masih perlu menjadi prioritas, baik melalui program pelatihan, pengembangan kompetensi, maupun sistem pembinaan kinerja yang lebih terarah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada area Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya mencapai 91,09%, yang berada pada kategori Baik. Angka ini menggambarkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan terlihat jelas pada aspek perencanaan dan penganggaran, dengan keselarasan dokumen perencanaan terhadap Renstra tercapai 100%, bahkan jumlah dokumen perencanaan melampaui target hingga 120%. Begitu pula pada pelaksanaan anggaran, unit kerja berhasil menjaga tingkat penyerapan yang tinggi (99,46%) dan memastikan ketercapaian output belanja. Pada pengelolaan aset BMN dan layanan publik berbasis SOP, target tercapai penuh 100%, menandakan adanya peningkatan tertib administrasi serta standarisasi layanan yang semakin baik.

Namun demikian, masih terdapat tantangan serius pada aspek profesionalisme ASN. Kedua indikator terkait ASN menunjukkan capaian yang jauh di bawah target, masing-masing 66% dan 48%. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah strategis yang lebih fokus pada peningkatan kompetensi, penguatan kapasitas, serta penataan sistem pembinaan karier ASN agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan standar profesional yang diharapkan.

Dengan capaian 91,09%, unit kerja telah menunjukkan kinerja yang solid dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Ke depan, diperlukan penguatan khusus pada aspek pengembangan SDM ASN agar kualitas manajemen semakin seimbang dengan capaian pada bidang perencanaan, penganggaran, aset, dan layanan publik.

6. IKK Persentase ASN yang memiliki Nilai Indeks Profesional berkategori tinggi (minimum 81)

Indikator Persentase ASN yang memiliki Nilai Indeks Profesional berkategori tinggi (minimum 81) digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Profesionalisme ASN dinilai dari aspek kompetensi, kinerja, integritas, dan etika kerja, yang semuanya menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pada tahun pelaporan, capaian indikator ini berada pada angka 60,74% dari

target 97%, atau hanya mencapai **66%** dari target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan cukup besar antara target dan realisasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar ASN belum sepenuhnya mampu mencapai kategori profesionalisme tinggi, khususnya dalam aspek kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial-kultural. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian ini antara lain:

1. Keterbatasan kesempatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, maupun pendidikan lanjutan.
2. Variasi kemampuan ASN dalam menguasai teknologi informasi yang semakin dibutuhkan dalam tata kelola birokrasi modern.
3. Belum meratanya budaya kinerja berbasis outcome, sehingga sebagian ASN belum berorientasi pada hasil yang terukur.
4. Pengaruh pandemi Covid-19 yang sempat membatasi kegiatan pengembangan kapasitas pegawai.

Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan akses dan intensitas program pengembangan kompetensi ASN, baik melalui diklat, coaching, maupun sertifikasi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Learning Management System (LMS) dan platform digital untuk pelatihan daring sehingga jangkauan lebih luas.
3. Mendorong budaya kinerja berbasis outcome, dengan memperkuat sistem penilaian kinerja yang adil, transparan, dan berorientasi pada hasil.
4. Memberikan penghargaan dan insentif bagi ASN yang berhasil mencapai nilai indeks profesional tinggi, untuk memotivasi peningkatan kinerja secara kolektif.
5. Memperkuat sistem pembinaan karier berbasis merit system, sehingga ASN terdorong untuk meningkatkan profesionalismenya.

Dengan capaian 60,74% ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian ASN telah menunjukkan profesionalisme tinggi, namun upaya perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan tetap diperlukan. Hal ini penting agar target peningkatan profesionalisme ASN dapat tercapai, sehingga peran ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat bangsa dapat diwujudkan secara optimal.

Tabel 3.12 Capaian Indikator Persentase ASN yang memiliki Nilai Indeks Profesional Tinggi (minimum 81)

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	83%	86%	93%	95%	97%	90,8%	Target tidak dapat tercapai
Realisasi	-	74,75%	63,88%	92%	73,08%	60,74%	
%	-	87%	69%	97%	75%	65,6%	

7. IKK Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi levelling kompetensi jabatannya

Indikator Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi levelling kompetensi jabatannya mengukur sejauhmana ASN telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk jabatan masing-masing. Kompetensi yang dimaksud mencakup **kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural** sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LAN tentang Pengembangan Kompetensi ASN. Indikator ini menjadi penting karena kesesuaian kompetensi dengan jabatan akan berpengaruh langsung pada kualitas kinerja dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pada tahun pelaporan, capaian indikator ini hanya mencapai 41,4% dari target 90%, atau baru sebesar **48%** dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN belum memiliki level kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan masing-masing. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan kompetensi (competency gap) yang cukup signifikan di lingkungan unit kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya capaian antara lain:

1. Terbatasnya program pengembangan kompetensi yang terarah sesuai kebutuhan jabatan karena keterbatasan anggaran.
2. Pelatihan yang tersedia masih bersifat umum, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik jabatan fungsional maupun struktural.
3. Belum optimalnya penerapan Individual Development Plan (IDP) sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai.
4. Kurangnya monitoring dan evaluasi atas hasil pelatihan sehingga tidak terukur dampaknya terhadap peningkatan kompetensi.
5. Transformasi kelembagaan dan perubahan nomenklatur yang membuat sebagian pegawai mengalami pergeseran tupoksi, namun belum diikuti dengan pemenuhan kompetensi baru.

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Menyusun peta kompetensi jabatan (competency mapping) secara detail untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi ASN.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, termasuk sertifikasi profesi yang relevan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan platform digital dan e-learning untuk memperluas akses pembelajaran, terutama bagi ASN di daerah.
4. Mewajibkan penyusunan Individual Development Plan (IDP) sebagai instrumen pengembangan karier dan kompetensi setiap ASN.
5. Membangun sistem monitoring pasca-pelatihan, guna memastikan transfer knowledge dan aplikasi kompetensi dalam pekerjaan nyata.
6. Memberikan afirmasi bagi jabatan strategis agar segera dipenuhi kompetensinya melalui program pelatihan intensif atau penugasan khusus.

Dengan capaian 41,4%, jelas bahwa indikator ini masih jauh dari target. Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi peringatan penting untuk mempercepat

transformasi sumber daya manusia ASN. Upaya perbaikan yang konsisten akan membantu memastikan ASN mampu menjalankan tugasnya secara profesional, adaptif, dan sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Persentase ASN yang memiliki Nilai Indeks Profesional Tinggi (minimum 81)

Uraian	Tahun						Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Target	83%	86%	93%	95%	97%	90,8%	Target tidak dapat tercapai
Realisasi	-	74,75%	63,88%	92%	73,08%	60,74%	
%	-	87%	69%	97%	75%	65,6%	

3.2 Analisis Realisasi Anggaran Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020-2024

Pengelolaan anggaran Balai Litbang Agama Makassar selama periode Renstra 2020-2024 berlangsung dalam konteks dinamika kelembagaan dan kebijakan nasional yang cukup signifikan. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan tren fluktuatif, dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, kebijakan refocusing, serta transformasi kelembagaan menuju Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM).

Tahun 2020, tahun pertama Renstra diwarnai oleh kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Alokasi anggaran Balai mengalami pemangkasan signifikan, sehingga beberapa program penelitian lapangan tidak dapat dilaksanakan. Sebagai alternatif, metode penelitian bergeser ke pendekatan studi literatur dan pengumpulan data daring. Hal ini berdampak pada realisasi anggaran yang relatif rendah, meskipun dari sisi efisiensi masih dapat dikendalikan.

Tahun 2021, Pandemi masih berlanjut, namun penyesuaian pelaksanaan kegiatan mulai dilakukan. Balai Litbang Agama Makassar melaksanakan beberapa penelitian dengan model hybrid, memadukan daring dan tatap muka terbatas. Realisasi anggaran pada tahun ini lebih baik dibanding tahun 2020, meskipun capaian output belum optimal. Tingkat penyerapan anggaran berada pada kategori cukup, namun efektivitas capaian masih terkendala keterbatasan lapangan.

Tahun 2022, tahun ini menjadi titik penting karena implementasi Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN mulai berdampak. Peralihan jabatan fungsional peneliti ke BRIN mengurangi kapasitas Balai dalam melaksanakan fungsi litbang. Anggaran yang tersedia relatif menurun, dan realisasi kegiatan lebih difokuskan pada policy paper, sosialisasi hasil penelitian, serta kerjasama dengan pihak eksternal. Tingkat serapan anggaran cukup baik, namun terdapat gap antara rencana kegiatan dalam Renstra dengan realisasi aktual akibat perubahan fungsi kelembagaan.

Tahun 2023, Dengan terbitnya Perpres Nomor 12 Tahun 2023 yang mengubah nomenklatur Badan Litbang dan Diklat menjadi BMBPSDM, alokasi anggaran Balai semakin diarahkan pada program penguatan moderasi beragama. Kegiatan

penelitian murni hampir tidak lagi menjadi fokus, digantikan dengan kegiatan asistensi, sosialisasi, dan penguatan ekosistem moderasi beragama. Realisasi anggaran berjalan cukup efisien, dengan serapan mencapai lebih dari 95%. Namun, perubahan fokus kegiatan menyebabkan beberapa target Renstra 2020-2024 tidak lagi relevan.

Tahun 2024, sebagai tahun terakhir Renstra, Balai Litbang Agama Makassar melaksanakan program dengan orientasi baru, yaitu moderasi beragama, pengembangan kebijakan, dan dukungan manajemen ASN. Realisasi anggaran menunjukkan capaian yang stabil, dengan tingkat penyerapan relatif tinggi (di atas 98%). Namun demikian, efektivitas capaian harus diukur bukan hanya dari sisi penyerapan, melainkan dari keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan sasaran strategis baru yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Secara keseluruhan, pengelolaan dan realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar pada periode 2020-2024 dapat dikatakan cukup baik dari sisi efisiensi, meskipun menghadapi berbagai dinamika kelembagaan dan tantangan eksternal. Tingkat penyerapan anggaran setiap tahunnya relatif tinggi, rata-rata di atas 95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa unit kerja mampu mengoptimalkan alokasi dana yang diberikan, meskipun ruang fiskal seringkali terbatas akibat kebijakan refocusing dan penghematan nasional. Tingginya penyerapan anggaran ini menjadi indikator bahwa Balai cukup adaptif dalam mengelola program dan kegiatan agar sesuai dengan pagu yang tersedia.

Namun, bila ditinjau dari aspek kesesuaian dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra 2020-2024), terdapat masalah serius. Sejak tahun 2022, terjadi ketidaksinkronan antara target Renstra dengan realisasi kegiatan, terutama akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang menyebabkan beralihnya jabatan fungsional peneliti dari Kementerian Agama ke BRIN. Hal ini mengakibatkan fungsi penelitian di Balai Litbang Agama praktis berhenti, sementara Renstra masih berbasis pada indikator kinerja penelitian. Akibatnya, beberapa indikator kinerja utama (IKU) tidak dapat dipenuhi, meskipun anggaran tetap terserap. Kondisi ini mencerminkan bahwa serapan tinggi belum tentu berbanding lurus dengan kesesuaian arah strategis.

Dari sisi efektivitas program, capaian Balai mengalami pasang surut. Pada tahun 2020-2021, pandemi Covid-19 menjadi faktor penghambat utama, dimana sebagian besar penelitian lapangan dibatasi atau dialihkan ke metode daring. Hal ini membuat hasil penelitian kurang optimal, baik dari sisi kualitas data maupun pemanfaatannya. Namun sejak 2022 hingga 2024, efektivitas kembali meningkat karena fokus kegiatan diarahkan pada program-program strategis yang relevan dengan mandat baru, seperti asistensi, sosialisasi hasil penelitian terdahulu, penguatan moderasi beragama, dan penyusunan policy paper. Perubahan orientasi ini menunjukkan adanya upaya adaptasi yang cukup cepat agar alokasi anggaran tetap relevan dengan kebutuhan kelembagaan.

Meski demikian, terdapat beberapa kendala utama yang menjadi catatan penting. Pertama, refocusing anggaran pandemi yang memangkas kegiatan utama Balai. Kedua, transformasi kelembagaan yang menggeser fungsi penelitian tanpa

diikuti dengan revisi Renstra, sehingga dokumen perencanaan dan realisasi program berjalan tidak sinkron. Ketiga, keterbatasan anggaran operasional yang membuat jangkauan program hanya bisa dilakukan di wilayah terbatas. Keempat, lemahnya monitoring dan evaluasi yang seharusnya memastikan keterhubungan antara serapan anggaran, output kegiatan, dan outcome strategis.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti. Pertama, perlu segera dilakukan sinkronisasi dokumen perencanaan (Renstra, RKT, Perkin) dengan nomenklatur dan fungsi baru Balai pasca perubahan struktur organisasi. Kedua, perlu ditingkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan lebih memfokuskan kegiatan pada isu-isu strategis seperti moderasi beragama, penguatan kebijakan, dan pengembangan SDM ASN. Ketiga, perlu memperkuat kolaborasi kelembagaan dengan BRIN, PTKIN, maupun lembaga riset eksternal untuk memastikan basis data kebijakan tetap kuat meskipun fungsi penelitian internal terbatas. Keempat, membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome, agar serapan anggaran tidak hanya sekadar tinggi secara angka, tetapi juga bermakna bagi masyarakat dan pengambil kebijakan.

Dengan demikian, meskipun capaian serapan anggaran Balai Litbang Agama Makassar selama 2020-2024 dapat dikategorikan baik, tantangan terbesar justru terletak pada sinkronisasi arah strategis kelembagaan. Oleh karena itu, ke depan Balai perlu menata ulang prioritas program dan indikator kinerjanya agar sejalan dengan mandat baru, sehingga realisasi anggaran dapat memberikan dampak yang lebih signifikan. Berikut alokasi Anggaran Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020 - 2024 berdasarkan Renstra dan RKA-K/L:

Tabel 3.14 Perbandingan Alokasi Anggaran Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Renstra dan Pagu RKA-K/L

Tahun	Pagu Renstra (Rp)	Pagu RKAKL Akhir (Rp)	(dalam ribuan)	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2020	18.084.000	15.433.463	15.250.586	98,82%
2021	22.254.000	19.530.526	19.508.506	99,89%
2022	27.024.000	12.901.669	12.897.439	99,97%
2023	33.002.000	14.528.423	14.525.987	99,98%
2024	36.236.000	12.490.619	12.321.690	98,65%

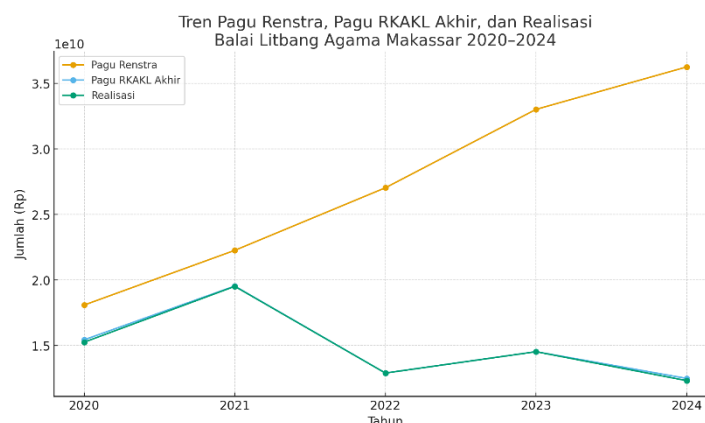
Berdasarkan data, terlihat bahwa secara umum tingkat realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar selama lima tahun terakhir tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata persentase realisasi mencapai di atas 98%. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan unit kerja dalam mengelola dan menyerap anggaran berada pada kategori baik.

Tahun 2020, pagu Renstra sebesar Rp 18,084,000,000.00, sementara pagu RKAKL akhir setelah refocusing menjadi Rp 15,433,463,000.00. Realisasi anggaran mencapai Rp 15,250,586,876.00 atau 98,82%. Penurunan pagu terjadi karena adanya kebijakan penghematan anggaran di masa pandemi Covid-19, namun serapan tetap tinggi menunjukkan efektivitas pelaksanaan program meskipun dalam keterbatasan. Tahun 2021, pagu Renstra sebesar Rp 22,254,000,000.00, dengan pagu RKAKL akhir Rp 19,530,526,000.00. Realisasi mencapai Rp 19,508,506,323.00 atau 99,89%. Tahun ini menjadi salah satu capaian terbaik, karena hampir seluruh anggaran dapat diserap. Meskipun pandemi masih berlangsung, Balai mampu melakukan adaptasi kegiatan, baik

secara daring maupun luring terbatas.

Tahun 2022, pagu Renstra meningkat menjadi Rp 27,024,000,000,00, namun pagu RKAKL akhir hanya Rp 12,901,669,000.00. Realisasi mencapai Rp 12,897,439,760.00 atau 99,97%. Penurunan drastis pagu ini dipengaruhi oleh kebijakan peralihan kewenangan penelitian ke BRIN, sehingga alokasi anggaran Balai lebih difokuskan pada fungsi non-penelitian. Tingginya serapan menunjukkan bahwa anggaran yang terbatas dapat dioptimalkan, meskipun terjadi ketidaksinkronan dengan target Renstra. Tahun 2023, pagu Renstra sebesar Rp 33,002,000,000.00, sementara pagu RKAKL akhir hanya Rp 14,528,423,000.00. Realisasi tercatat Rp 14,525,927,019.00 atau 99,98%, menjadikan tahun 2023 dengan persentase serapan tertinggi. Sama seperti tahun sebelumnya, adanya perbedaan signifikan antara pagu Renstra dan RKAKL akhir menegaskan perlunya penyesuaian dokumen perencanaan dengan struktur kelembagaan baru.

Tahun 2024, pagu Renstra ditetapkan Rp 36,236,000,000.00, sedangkan pagu RKAKL akhir Rp 12,490,619,000.00. Realisasi mencapai Rp 12,321,690,752.00 atau 98,65%. Walaupun serapan sedikit menurun dibanding dua tahun sebelumnya, capaian ini masih tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan konsistensi Balai dalam menyerap anggaran, meskipun terjadi keterbatasan pagu dan perubahan orientasi kelembagaan.



Grafik 3.1 Tren Pagu Renstra, RKAKL dan Realisasi TA 2020-2024

Grafik di atas memperlihatkan perbandingan antara Pagu Renstra, Pagu RKAKL Akhir, dan Realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020-2024. Terlihat bahwa nilai Pagu RKAKL Akhir dan Realisasi jauh lebih rendah dibandingkan Pagu Renstra, menandakan adanya kebijakan refocusing, efisiensi, maupun penyesuaian anggaran.

Namun, meskipun terjadi penurunan signifikan pada Pagu RKAKL, tingkat realisasi anggaran selalu tinggi (di atas 98%), bahkan hampir menyentuh 100% setiap tahun. Hal ini menunjukkan kemampuan unit kerja dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien, meskipun dengan keterbatasan.

Tabel 3.15 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	2020			2021			2022			2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	8.413.120.000	8.347.835.261	99,224%	9.045.673.000	9.043.838.066	99,980%	5.118.632.000	5.117.661.455	99,981%	4.187.476.000	4.186.728.089	99,982%	4.991.155.000	4.972.566.988	99,63%
Belanja Barang	7.020.343.000	6.902.751.615	98,325%	9.803.784.000	9.783.751.967	99,796%	7.115.145.000	7.111.964.305	99,955%	9.566.157.000	9.563.728.558	99,975%	7.339.464.000	7.189.123.360	97,95%
Belanja Modal	-	-	-	681.069.000	680.916.290	99,978%	667.892.000	667.814.000	99,988%	775.808.000	775.808.000	100,000%	160.000.000	160.000.000	100,00%
Total	15.433.463.000	15.250.586.876	98,815%	19.530.526.000	19.508.506.323	99,887%	12.901.669.000	12.897.439.760	99,967%	14.529.441.000	14.526.264.647	99,978%	12.490.619.000	12.321.690.348	98,65%

Pada tahun 2020, Balai Litbang Agama Makassar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp15,43 miliar dengan realisasi mencapai Rp15,25 miliar atau 98,82%. Belanja terbesar terdapat pada Belanja Pegawai (Rp8,34 miliar, 99,22%) dan Belanja Barang (Rp6,90 miliar, 98,33%), tanpa adanya belanja modal. Tingkat realisasi ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup optimal meskipun tahun 2020 diwarnai dengan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

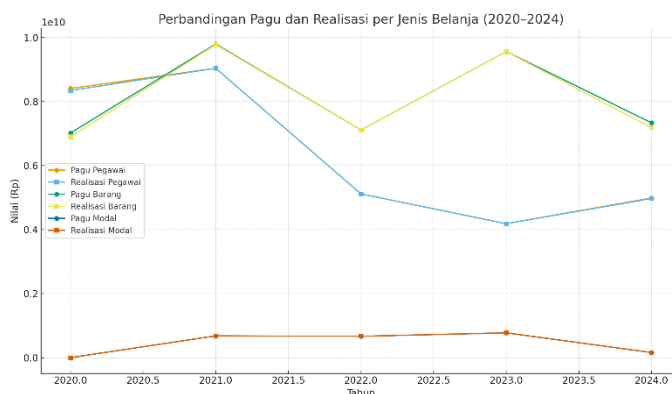
Tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan pada pagu anggaran, yakni Rp19,53 miliar, dengan realisasi Rp19,51 miliar atau 99,89%. Alokasi tambahan ini utamanya untuk mendukung belanja barang serta pengadaan sarana melalui Belanja Modal sebesar Rp681 juta yang terealisasi 99,98%. Realisasi belanja pegawai maupun barang tetap tinggi, masing-masing di atas 99%. Hal ini menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan tambahan program dan kebijakan nasional pasca awal pandemi.

Tahun 2022 terjadi penurunan drastis pada pagu anggaran menjadi hanya Rp12,90 miliar akibat kebijakan efisiensi dan penyesuaian struktur kelembagaan. Meski demikian, realisasi mencapai Rp12,89 miliar atau 99,97%, menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran. Realisasi belanja pegawai (Rp5,11 miliar, 99,98%), belanja barang (Rp7,11 miliar, 99,96%), dan belanja modal (Rp667 juta, 99,99%) semuanya berjalan sangat baik.

Pada 2023, pagu meningkat kembali menjadi Rp14,53 miliar, dengan realisasi Rp14,53 miliar atau 99,98%. Belanja pegawai tercatat Rp4,18 miliar (99,98%), belanja barang Rp9,56 miliar (99,98%), dan belanja modal Rp775 juta dengan serapan sempurna 100%. Kinerja ini menandakan konsistensi Balai Litbang Agama Makassar dalam menjaga akuntabilitas keuangan meskipun terjadi dinamika anggaran.

Tahun 2024 ditandai dengan turunnya pagu anggaran menjadi Rp12,49 miliar. Realisasi tercatat Rp12,32 miliar atau 98,65%. Belanja pegawai tetap tinggi (Rp4,97 miliar, 99,63%), belanja modal terealisasi sempurna (Rp160 juta, 100%), sedangkan belanja barang mengalami sedikit penurunan realisasi (Rp7,19 miliar, 97,95%) dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan atau penghematan belanja operasional pada tahun terakhir.

Secara keseluruhan, periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Balai Litbang Agama Makassar mampu mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel dengan rata-rata realisasi di atas 98% setiap tahunnya. Fluktuasi pagu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti refocusing anggaran, kebijakan efisiensi nasional, serta restrukturisasi kelembagaan. Meskipun demikian, tingkat realisasi tetap konsisten sangat tinggi, menandakan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.



Grafik 3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

Diagram di atas menampilkan perbandingan pagu dan realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar tahun 2020-2024 berdasarkan jenis belanja:

- Belanja Pegawai relatif stabil dengan tingkat realisasi hampir mendekati 100% setiap tahun.
- Belanja Barang mengalami fluktuasi signifikan, namun realisasi selalu mengikuti pagu dengan persentase realisasi tinggi.
- Belanja Modal jumlahnya kecil dibanding jenis belanja lain, tetapi tingkat realisasi sangat optimal (mencapai 100% setiap tahun).

Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Fungsi

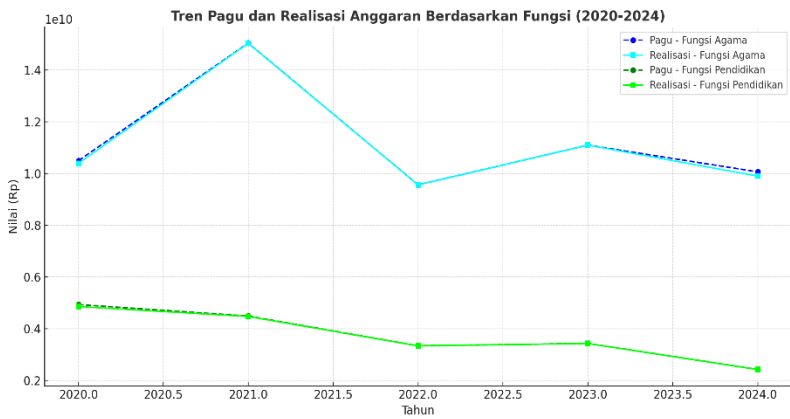
FUNGSI	2020			2021			2022			2023			2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Fungsi Agama	10.497.881.000	10.391.509.178	98,99%	15.040.539.000	15.031.908.973	99,94%	9.561.449.000	9.559.105.751	99,98%	11.097.276.000	11.096.027.777	99,99%	10.064.084.000	9.899.963.121	98,37%
Fungsi Pendidikan	4.935.582.000	4.859.077.698	98,45%	4.489.987.000	4.472.962.506	99,62%	3.340.220.000	3.338.334.009	99,94%	3.432.165.000	3.430.236.870	99,94%	2.426.535.000	2.421.727.227	99,80%
Total	15.433.463.000	15.250.586.876	98,82%	19.530.526.000	19.504.871.479	99,87%	12.901.669.000	12.897.439.760	99,97%	14.529.441.000	14.526.264.647	99,98%	12.490.619.000	12.321.690.348	98,65%

Realisasi anggaran Balai Litbang Agama Makassar berdasarkan fungsi selama periode 2020-2024 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, dengan rata-rata realisasi mencapai lebih dari 98% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien serta perencanaan yang relatif matang meskipun pagu anggaran mengalami fluktuasi. Dari sisi fungsi agama, terlihat bahwa alokasi anggaran setiap tahunnya relatif lebih besar dibanding fungsi pendidikan, berkisar antara 70% hingga 80% dari total anggaran. Realisasi fungsi agama juga konsisten berada di kisaran 99% hingga 100%, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 99,99%. Namun demikian, pada tahun 2024 realisasi sedikit menurun menjadi 98,37%, yang kemungkinan disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat terserap sepenuhnya karena keterbatasan waktu atau penyesuaian kebijakan.

Sementara itu, pada fungsi pendidikan, meskipun alokasi anggaran cenderung menurun dari tahun ke tahun, realisasi selalu menunjukkan kinerja yang optimal. Tahun 2020 fungsi pendidikan memperoleh alokasi Rp4,93 miliar dengan realisasi 98,45%. Namun, pada tahun 2024 alokasinya menurun drastis menjadi Rp2,42 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran, namun tetap dimanfaatkan dengan baik, terbukti dari tingkat realisasi yang tetap tinggi (99,80%). Jika dilihat secara keseluruhan, total pagu anggaran mengalami kenaikan signifikan hingga tahun 2021 sebesar Rp19,53 miliar, sebelum kemudian menurun tajam di

tahun 2022 menjadi Rp12,90 miliar, dan kembali berfluktuasi pada tahun berikutnya. Meskipun demikian, capaian realisasi selalu tinggi dengan puncaknya pada tahun 2023, yaitu sebesar 99,98%.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Balai Litbang Agama Makassar berdasarkan fungsi berada pada kategori sangat baik. Konsistensi realisasi yang hampir sempurna menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan kebijakan dan fluktuasi alokasi, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif. Namun, kecenderungan penurunan alokasi pada fungsi pendidikan dan turunnya tingkat serapan pada tahun 2024 menjadi catatan penting untuk dievaluasi agar ke depan pengelolaan anggaran tetap mampu mendukung prioritas pembangunan bidang agama dan pendidikan secara seimbang.



Grafik 3.3 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Fungsi

Fungsi Agama: anggaran relatif lebih besar dibanding fungsi pendidikan, dengan puncak tertinggi di tahun 2021. Realisasi hampir selalu mendekati pagu, menunjukkan konsistensi serapan anggaran. Fungsi Pendidikan: cenderung lebih rendah dan mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun, meskipun realisasinya juga mendekati pagu setiap tahun.

Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
2153	-	-	-	2.137.426.000	2.135.215.796	99,90%	462.149.000	462.130.750	100,00%	2.555.292.000	2.555.083.615	99,99%	1.468.542.000	1.468.104.487	99,97%
2154	-	-	-	1.076.394.000	1.075.041.882	99,87%	145.852.000	145.327.200	99,64%	1.223.435.000	1.223.429.500	100,00%	1.066.045.000	938.214.064	88,01%
2155	2.387.259.000	2.346.229.741	98,28%	2.912.640.000	2.903.674.046	99,69%	1.047.462.000	1.046.683.315	99,93%	2.543.052.000	2.541.127.037	99,92%	1.658.969.000	1.654.249.627	99,72%
2156	10.497.881.000	10.391.509.178	98,99%	11.826.719.000	11.825.010.139	99,99%	8.953.448.000	8.951.647.801	99,98%	7.318.549.000	7.317.514.662	99,99%	7.529.497.000	7.493.644.570	99,52%
5311	2.548.323.000	2.512.847.957	98,61%	1.577.347.000	1.569.564.460	99,51%	2.292.758.000	2.291.650.694	99,95%	889.113.000	889.109.833	100,00%	767.566.000	767.477.600	99,99%
Total	15.433.463.000	15.250.586.876	98,82%	19.530.526.000	19.508.506.323	99,89%	12.901.669.000	12.897.439.760	99,97%	14.529.441.000	14.526.264.647	99,98%	12.490.619.000	12.321.690.348	98,65%

Secara umum, realisasi anggaran berdasarkan kegiatan pada Balai Litbang Agama Makassar periode 2020-2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat serapan rata-rata berada di atas 98% setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program kerja mampu berjalan secara efektif, meskipun terdapat beberapa catatan penting pada kegiatan tertentu.

Kegiatan 2153 mulai dianggarkan pada tahun 2021 dengan alokasi Rp2,13

miliar dan mampu direalisasikan hampir penuh (99,90%). Tren pagu kegiatan ini meningkat hingga Rp2,55 miliar pada 2023, dengan realisasi 99,99%, kemudian mengalami penurunan pada 2024 menjadi Rp1,46 miliar. Meski terjadi fluktuasi pada alokasi pagu, realisasi kegiatan ini tetap sangat optimal dan konsisten di atas 99%.

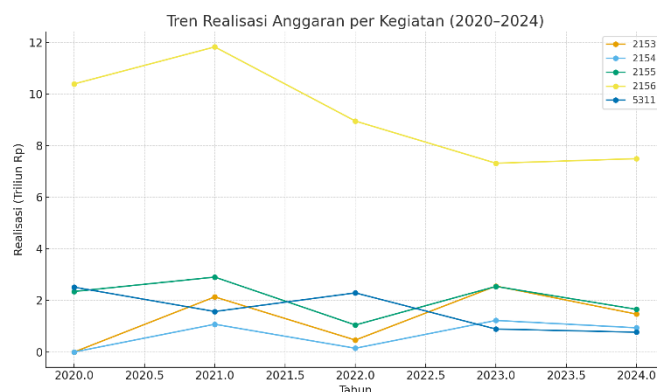
Kegiatan 2154 juga dimulai pada 2021 dengan pagu Rp1,07 miliar dan realisasi Rp1,07 miliar (99,87%). Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kinerja serupa dengan tingkat realisasi hampir 100%. Namun, pada 2024 terjadi penurunan signifikan, di mana realisasi hanya mencapai 88,01% dari pagu Rp1,06 miliar. Hal ini menjadi perhatian penting karena merupakan satu-satunya kegiatan yang realisasinya jauh di bawah standar capaian tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan 2155 sudah berjalan sejak 2020 dengan pagu Rp2,38 miliar dan realisasi 98,28%. Pada tahun-tahun berikutnya, kegiatan ini tetap terjaga dengan serapan yang sangat tinggi, bahkan pada 2023 realisasi mencapai Rp2,54 miliar (99,92%). Tahun 2024 kembali menunjukkan konsistensi dengan realisasi 99,72%. Artinya, kegiatan ini selalu terlaksana dengan efektif tanpa hambatan berarti.

Kegiatan 2156 merupakan kegiatan dengan alokasi anggaran terbesar di antara kegiatan lainnya. Pada 2020 pagu mencapai Rp10,49 miliar dengan realisasi Rp10,39 miliar (98,99%). Pada 2021-2023, alokasi dan realisasi tetap tinggi di atas Rp7 miliar, dengan persentase serapan hampir sempurna mendekati 100%. Pada 2024, meski terjadi penurunan pagu menjadi Rp7,49 miliar, realisasi tetap sangat tinggi dengan capaian 99,52%. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan program utama yang dijalankan secara konsisten dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan anggaran.

Kegiatan 5311 meskipun alokasinya relatif kecil dibanding kegiatan lain, menunjukkan kinerja yang konsisten baik. Pada 2020 realisasi mencapai 98,61%, dan pada 2021 sebesar 99,51%. Selanjutnya, pada 2022 hingga 2024 kegiatan ini terus menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan realisasi di atas 99,9%, bahkan hampir mendekati 100%.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran per kegiatan menunjukkan bahwa manajemen anggaran di Balai Litbang Agama Makassar mampu dikelola dengan baik dan efisien. Dengan pengecualian pada Kegiatan 2154 di tahun 2024 yang mengalami penurunan serapan, seluruh kegiatan menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, mencerminkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang efektif.



Grafik 3.4 Tren Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Berikut analisis Tren Realisasi Anggaran 2020-2024 : Kegiatan 2156 menjadi kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar setiap tahunnya. Tahun 2021 mencatat realisasi tertinggi mendekati Rp 11,8 miliar kemudian menurun di tahun 2022 (Rp 8,9 miliar) dan relatif stabil di kisaran Rp 7,3-7,4 miliar pada 2023-2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan setelah 2021, kegiatan 2156 tetap menjadi prioritas utama. Kegiatan 2155, mengalami kenaikan pada 2021 (Rp 2,9 miliar), kemudian turun di 2022 (Rp 1,0 miliar). Tahun 2023 meningkat kembali (Rp2,5 miliar), namun sedikit menurun lagi di 2024 (Rp 1,6 miliar). Hal ini menggambarkan adanya fluktuasi yang cukup tajam, menunjukkan sifat kegiatan yang fleksibel mengikuti kebutuhan tahunan.

Kegiatan 2153, baru muncul pada 2021 dengan realisasi cukup besar (Rp 2,1 miliar). Tahun 2022 relatif kecil (Rp 462 juta), melonjak drastis pada 2023 (Rp 2,5 miliar), lalu turun lagi di 2024 (Rp 1,4 miliar). Fluktuasi tinggi ini menunjukkan sifat kegiatan yang tidak rutin dan sangat bergantung pada prioritas anggaran tertentu. Kegiatan 2154, nilainya relatif kecil dibanding kegiatan lainnya. Tren stabil dengan kisaran Rp 1,0-1,2 miliar dari 2021-2023, namun pada 2024, realisasi turun signifikan menjadi hanya Rp 938 juta (sekitar 88% dari pagu). Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya efisiensi atau kendala penyerapan anggaran. Kegiatan 5311, Tahun 2020-2021 berada di kisaran Rp 2,5 miliar, namun sejak 2022 menurun drastis menjadi di bawah Rp 900 juta. Pada 2024 realisasi stabil di angka Rp 767 juta. Tren ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas, di mana kegiatan 5311 tidak lagi menjadi fokus utama alokasi anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran selalu mendekati 100% dari pagu, menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik. Kegiatan 2156 menjadi kegiatan dominan dan prioritas dengan alokasi terbesar meskipun mengalami tren menurun setelah 2021. Kegiatan 2153 dan 2155 menunjukkan pola fluktuatif yang tajam, menggambarkan sifat kegiatan yang adaptif terhadap kebutuhan tahunan. Kegiatan 2154 dan 5311 relatif kecil kontribusinya, dengan kecenderungan menurun di tahun terakhir.

Selain realisasi anggaran yang sangat baik, untuk mengukur akuntabilitas kinerja anggaran, Kementerian Keuangan telah merumuskan Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai ini diperoleh melalui aplikasi SMART DJA Kemenkeu <https://monev.kemenkeu.go.id>. Sebelum tahun 2020, pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga, termasuk Balai Litbang Agama Makassar, masih menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Instrumen ini menitikberatkan pada aspek kepatuhan teknis pelaksanaan anggaran, seperti revisi DIPA, deviasi, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, kontraktual, dan pengelolaan UP/TUP.

Sejak tahun 2020, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran meluncurkan SMART-DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terintegrasi) sebagai pengganti IKPA. SMART-DJA menghadirkan paradigma baru dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran dengan indikator yang lebih komprehensif, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran, yang mengukur tingkat realisasi anggaran terhadap pagu

yang ditetapkan.

2. Konsistensi, yang menilai keselarasan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan dokumen perencanaan strategis.
3. Capaian Realisasi Output (CRO), yang melihat keterkaitan antara belanja dengan output yang dihasilkan.
4. Efisiensi, yang menilai kesesuaian antara input dan output anggaran.
5. Nilai Efisiensi, sebagai instrumen tambahan yang memperlihatkan efektivitas penggunaan sumber daya.

Penerapan SMART-DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terintegrasi) secara nasional dimulai pada tahun anggaran 2020 sebagai pengganti instrumen penilaian IKPA. Namun, dalam implementasinya, jejak rekam nilai SMART-DJA Balai Litbang Agama Makassar untuk tahun 2020 tidak tersedia dalam aplikasi resmi.

Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor:

1. Masa Transisi Sistem Penilaian

Tahun 2020 merupakan fase peralihan dari IKPA menuju SMART-DJA. Pada periode ini, sebagian besar satuan kerja, termasuk Balai Litbang Agama Makassar, masih menggunakan indikator IKPA untuk pelaporan internal, sementara SMART-DJA belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem aplikasi.

2. Keterbatasan Integrasi Data Awal

Sebagai tahun pertama, tidak semua data historis hasil pengukuran dapat termigrasi ke dalam aplikasi SMART. Akibatnya, meskipun evaluasi berbasis SMART telah dimulai, hasilnya tidak tercatat dalam dashboard aplikasi untuk tahun 2020.

3. Refocusing Anggaran akibat Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran secara masif. Kondisi ini turut memengaruhi konsistensi pencatatan, sehingga data SMART-DJA tahun tersebut tidak terdokumentasi secara komprehensif.

Dengan demikian, meskipun secara normatif SMART-DJA sudah diberlakukan pada tahun 2020, data nilai SMART Balai Litbang Agama Makassar baru tersedia secara konsisten sejak tahun 2021. Oleh karena itu, analisis kinerja berdasarkan SMART-DJA dalam periode Renstra 2020-2024 lebih tepat dimulai dari tahun 2021, sedangkan capaian tahun 2020 tetap dapat dirujuk melalui hasil penilaian IKPA yang masih berlaku pada saat itu.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode K/PN	Kode Suber	Uraian Suber	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Koreksi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Koreksi Bobot)	Nilai EKA (SMART)								
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan OP dan TUP	LPJ Berakutansi	Disposisi SPM	Penyerapan Anggaran	Pengeluaran Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Berkas				Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran	Komitmen	Capaian Kinerja	Efisiensi	Nilai EKA			
1	136	42538	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR	Nilai	87,50	69,56	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	99,72	0,00	100,00	99,53	0,00	85,00	59,24	68%	87,11								
			Bobot	5	5	5	0	8	5	5	15	0	10	5	0	5												
			Nilai Akhir	4,38	3,48	5,00	0,00	7,20	5,00	0,00	14,96	0,00	10,00	4,98	0,00	4,25												
			Nilai Akhir	87,50	69,56	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	99,72	0,00	100,00	99,53	0,00	85,00												
Catatan:																												
1) Matrik Indikator Kinerja Program/Agensi menunjukkan data transaksi untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang diptik. Nilai indikator pada matrik ditanggapi untuk kepentingan penyederhanaan data dan merupakan hasil total menjadi bagian dari RUPA (RUPAN dan RUPN).																												
2) Nilai mengacu nilai RUPA yang menjadi basis penilaian kegiatan dalam SLEP (SLEP 2020 Januari s.d. 31 Juli 2020 testing Penilaian RUPA KL, Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM SPAN, bilangan sesuai dengan nilai RUPA pada sistem, Analisis Data RUPA).																												

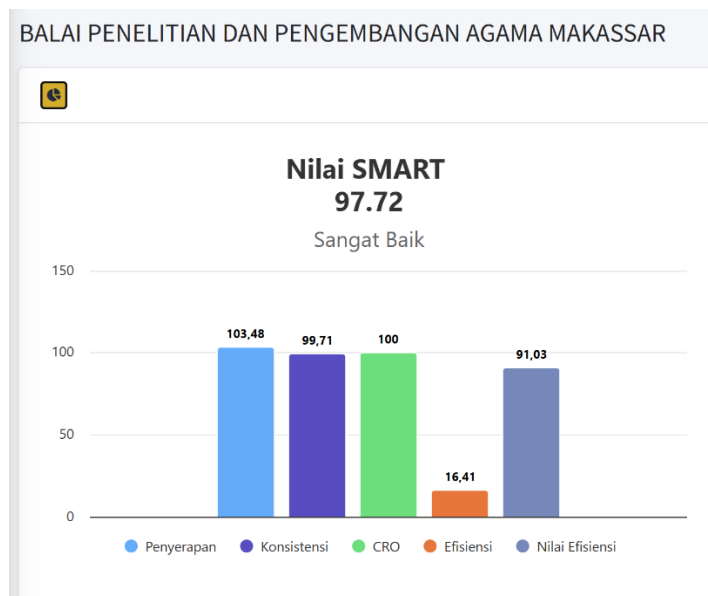
1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan rata-rata dari nilai indikator untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang dipilih. Nilai indikator pada modul ini ditampilkan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, bukan untuk menjadi dasar penilaian. WPA, ORSPAN dan BPA.

2) Untuk mengkonversi nilai IKPA yang menjadi basis penilaian kembali IKPA dalam 5,45-85,23/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian IKPA RI, Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OR SPAN, silahkan akses modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Revisi/Revisi).

Tabel 3.18 Nilai IKPA TA 2020

Analisis Indikator Pelaksanaan Anggaran

1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan (Nilai: 85,69), Nilai ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran cukup selaras dengan pelaksanaan di lapangan. Indikator seperti revisi DIPA (87,50) dan deviasi Halaman III DIPA (69,56) menunjukkan masih adanya perbedaan antara perencanaan awal dengan implementasi, meskipun secara umum capaian sudah baik.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi (Nilai: 63,33), Aspek ini merupakan nilai terendah dibandingkan aspek lain. Faktor penyebabnya antara lain adanya pagu minus (100) yang terkendali, namun data kontrak bernilai 0, serta adanya kekurangan pada beberapa indikator lain. Ini menandakan masih perlu penguatan kepatuhan administrasi, khususnya dalam pelaksanaan kontraktual.
3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Nilai: 99,75), Hampir mendekati sempurna, dengan penyerapan anggaran sebesar 99,72% dan capaian output 100%. Menunjukkan bahwa meskipun ada kendala dalam regulasi, secara umum kegiatan dapat terlaksana efektif dan mencapai target.
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (Nilai: 85,00), Nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi yang cukup baik. Namun, indikator retur SP2D (0) dan kesalahan SPM (0) menandakan adanya potensi risiko administrasi yang masih harus ditekan agar lebih optimal.
5. Nilai Total, Nilai akhir keseluruhan adalah 87,11 dengan bobot 68%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Balai Litbang Agama Makassar tergolong baik, dengan efektivitas dan efisiensi yang relatif tinggi, namun masih ada kelemahan dalam aspek kepatuhan regulasi.

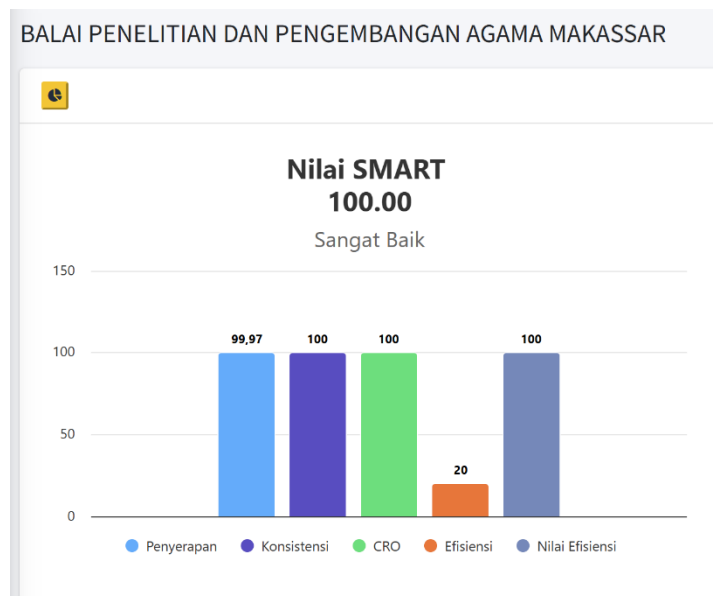


Grafik 3.5 Nilai Smart TA 2021

Analisis Komponen Penilaian

1. Penyerapan (103,48), Capaian penyerapan anggaran melebihi target (di atas 100%). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam pelaksanaan.
2. Konsistensi (99,71), Hampir mencapai 100%, artinya antara perencanaan dan pelaksanaan sangat konsisten. Indikator ini mencerminkan bahwa program/kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan baik tanpa deviasi signifikan.
3. CRO (100), Nilai sempurna menunjukkan bahwa kinerja output (Contract Realization Output) benar-benar sesuai target. Ini berarti seluruh kontrak dan kegiatan yang ditetapkan dapat dipenuhi tepat waktu dan sesuai standar.
4. Efisiensi (16,41), Menjadi indikator terlemah dengan nilai sangat rendah. Menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan, terdapat kelemahan pada penghematan biaya atau rasio input-output. Hal ini menjadi catatan penting karena dapat mengurangi efektivitas secara jangka panjang meskipun realisasi fisik dan keuangan tinggi.
5. Nilai Efisiensi (91,03), Secara umum, efisiensi masih berada di kategori baik, meskipun nilai indikator "efisiensi murni" rendah. Artinya masih ada ruang perbaikan dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan hasil yang lebih besar.

Kinerja tahun 2021 berhasil mencapai predikat sangat baik berkat penyerapan tinggi, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan yang kuat, serta pemenuhan output. Namun, aspek efisiensi harus menjadi fokus pembenahan melalui inovasi, pengendalian biaya, dan optimalisasi sumber daya.



Grafik 3.6 Nilai Smart TA 2022

Hasil penilaian SMART menunjukkan nilai akhir 100,00 (Sangat Baik). Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum pengelolaan pelaksanaan anggaran pada Balai Litbang Agama Makassar telah berjalan optimal. Berikut analisis tiap komponen:

1. Penyerapan Anggaran (99,97%)

Hampir mendekati 100%, menunjukkan bahwa pagu anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan secara maksimal. Artinya, program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tanpa adanya sisa anggaran signifikan.

2. Konsistensi (100%)

Capaian sempurna menandakan keselarasan antara dokumen perencanaan (Renstra, RKT, Perkin) dengan realisasi anggaran yang dijalankan. Hal ini memperlihatkan disiplin tinggi dalam menjaga konsistensi arah kebijakan dan implementasi program.

3. CRO (Contract Realization Output) - 100%

Menunjukkan bahwa realisasi kontraktual sesuai dengan output yang direncanakan. Artinya, seluruh belanja kontraktual berhasil dituntaskan tepat waktu dan sesuai sasaran.

4. Efisiensi (20%)

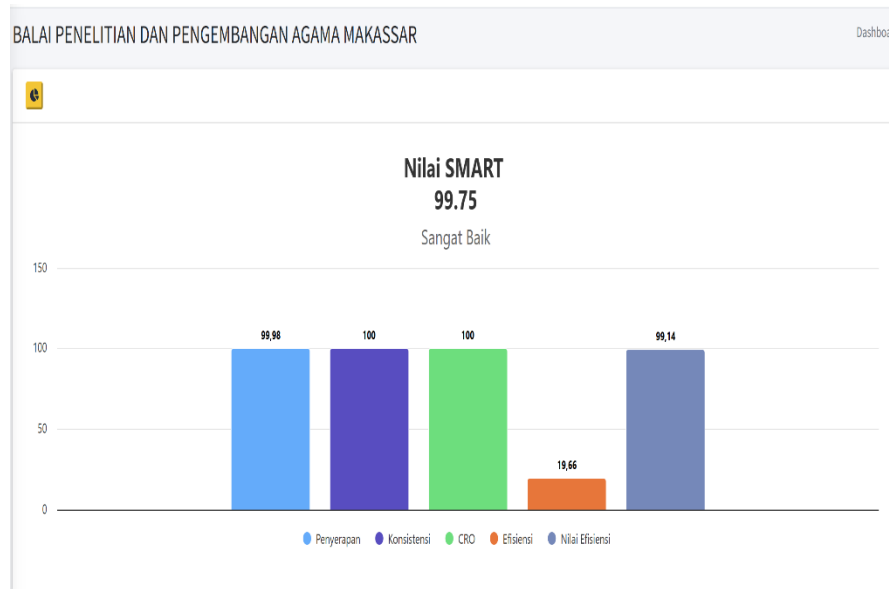
Capaian pada aspek efisiensi cukup rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam penggunaan anggaran agar lebih hemat namun tetap produktif. Efisiensi yang rendah bisa disebabkan oleh adanya kebutuhan belanja yang rigid atau terbatasnya ruang fleksibilitas anggaran.

5. Nilai Efisiensi (100%)

Meskipun skor efisiensi murni rendah, dari sisi nilai efisiensi secara keseluruhan tetap dianggap optimal. Hal ini berarti pengeluaran tetap dalam koridor aturan, akuntabel, dan tidak menimbulkan inefisiensi yang merugikan negara.

Secara umum, capaian nilai SMART 100,00 (Sangat Baik) memperlihatkan bahwa

Balai Litbang Agama Makassar berhasil menjaga kinerja anggaran pada tingkat optimal, baik dari sisi penyerapan, konsistensi, maupun pencapaian output. Kendati demikian, aspek efisiensi perlu mendapat perhatian lebih agar pemanfaatan anggaran tidak hanya maksimal, tetapi juga semakin hemat, efektif, dan memberi nilai tambah yang lebih besar.



Grafik 3.7 Nilai Smart TA 2023

Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran pada Balai Litbang Agama Makassar berada pada kategori **sangat baik** dengan konsistensi tinggi dalam menjaga keselarasan antara perencanaan dan realisasi.

Rincian Komponen:

1. Penyerapan Anggaran (99,98%)

Hampir sempurna, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam merealisasikan anggaran sesuai pagu. Tidak ada pemborosan atau sisa anggaran signifikan.

2. Konsistensi (100%)

Capaian sempurna menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran sejalan dengan perencanaan Renstra, RKT, dan Perkin.

3. CRO (100%)

Kontrak belanja berhasil direalisasikan sesuai output yang ditetapkan. Ini mengindikasikan kedisiplinan dalam pengelolaan kontraktual dan ketepatan waktu pelaksanaan.

4. Efisiensi (19,66%)

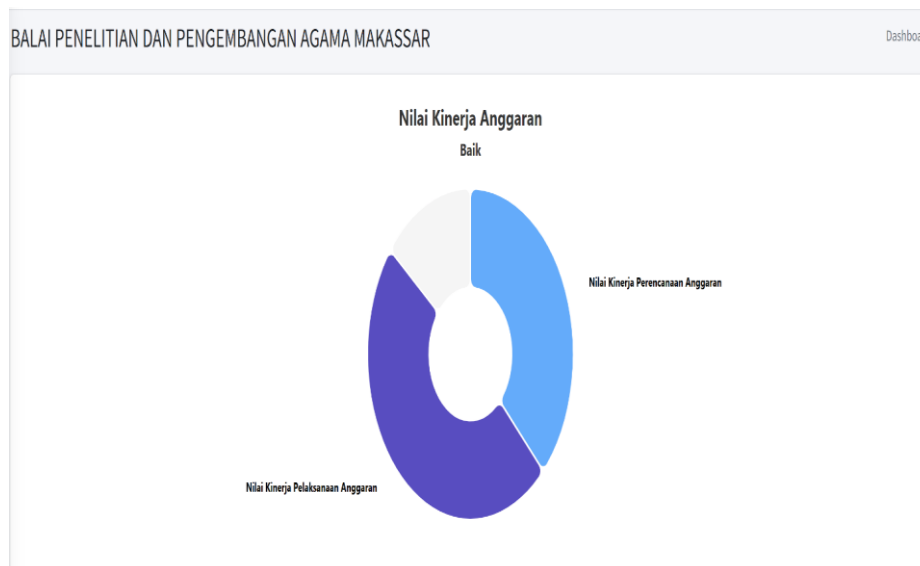
Angka ini relatif rendah, sama seperti tahun sebelumnya. Artinya, ada keterbatasan dalam menciptakan penghematan anggaran. Faktor yang mungkin memengaruhi adalah rigiditas belanja pegawai/barang yang sifatnya wajib sehingga ruang efisiensi kecil.

5. Nilai Efisiensi (99,14%)

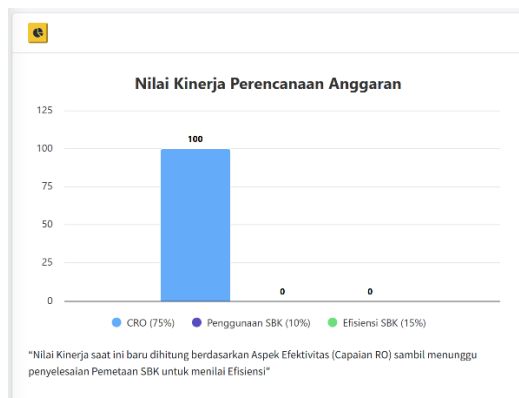
Walaupun skor efisiensi murni rendah, tetapi secara keseluruhan pengeluaran tetap

berada dalam kategori efisien, akuntabel, dan sesuai aturan.

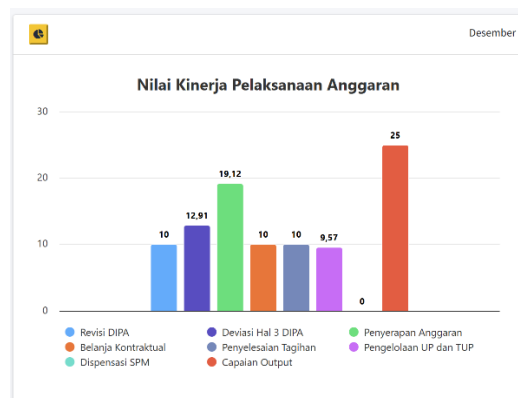
Hasil SMART sebesar 99,75 (Sangat Baik) menegaskan bahwa Balai Litbang Agama Makassar telah menjaga kualitas kinerja anggaran dengan konsistensi tinggi, serapan optimal, serta kepatuhan pada aturan kontraktual. Tantangan utama masih pada aspek efisiensi anggaran, yang perlu dioptimalkan dengan strategi inovatif agar pemanfaatan sumber daya semakin hemat dan produktif.



Grafik 3.8 Nilai NKA TA 2024



Grafik 3.9 Nilai Kinerja Perencanaan TA 2024



Grafik 3.10 Nilai Kinerja Pelaksanaan TA 2024

Secara umum, Nilai Kinerja Anggaran Balai Litbang Agama Makassar berada pada kategori “Baik”, yang menggambarkan pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai standar akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara. Komponen Utama yang Dinilai:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, RKA-KL, Perkin) telah disusun sesuai standar. Kualitas perencanaan yang baik memastikan keterkaitan yang erat antara sasaran strategis, alokasi pagu, dan output kegiatan. Dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sendiri, yang menjadi indikatornya adalah :
 - a) CRO (Contract Realization Output) - 100, nilai sempurna pada aspek CRO menunjukkan bahwa rencana output (RO) yang ditetapkan selaras dengan pelaksanaan kontraktual. Artinya, perencanaan anggaran sudah efektif dalam

mengarahkan kegiatan agar menghasilkan output sesuai target.

- b) Penggunaan SBK (0), belum ada capaian pada aspek penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK). Hal ini kemungkinan karena proses integrasi SBK masih dalam tahap awal atau belum sepenuhnya diimplementasikan pada unit kerja.
 - c) Efisiensi SBK (0), belum ada penilaian terkait efisiensi penggunaan SBK. Keterangan pada grafik juga menegaskan bahwa nilai kinerja baru dihitung berdasarkan efektivitas (CRO), sambil menunggu pemetaan SBK untuk aspek efisiensi.
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, menjadi bagian terbesar dari grafik, mengindikasikan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan cukup efektif. Tingkat serapan anggaran tinggi, realisasi sesuai target, serta pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai output. Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memperoleh capaian dengan kualitas yang beragam pada masing-masing indikator.
- a) Revisi DIPA (10 poin), kualitas perencanaan anggaran masih perlu diperkuat. Adanya revisi menunjukkan bahwa rencana awal belum sepenuhnya presisi.
 - b) Belanja Kontraktual (12,91 poin), pelaksanaan belanja kontraktual relatif baik, namun terdapat indikasi keterlambatan dalam pelaksanaan sehingga realisasi belum sepenuhnya optimal.
 - c) Deviasi Halaman III DIPA (19,12 poin), nilai yang cukup tinggi pada deviasi Halaman III DIPA menandakan adanya ketidaksesuaian signifikan antara alokasi awal dan realisasi anggaran. Hal ini menjadi catatan penting agar ke depan penyusunan anggaran lebih akurat dan realistis.
 - d) Penyelesaian Tagihan (10 poin), penyelesaian tagihan belum maksimal, masih terdapat keterlambatan yang berpotensi memengaruhi kelancaran pembayaran dan kredibilitas pelaksanaan anggaran.
 - e) Dispensasi SPM (10 poin), masih terdapat keterlambatan dalam pengajuan SPM yang berdampak pada kelancaran realisasi anggaran.
 - f) Capaian Output (9,57 poin), realisasi anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian output. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan orientasi kinerja agar setiap serapan anggaran menghasilkan output yang terukur dan bermakna.
 - g) Penyerapan Anggaran (25 poin), capaian tertinggi ada pada aspek penyerapan anggaran yang berjalan sangat baik dengan realisasi mendekati 100%. Hal ini membuktikan kapasitas manajerial dalam mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
 - h) Pengelolaan UP dan TUP (0 poin), aspek ini menjadi titik lemah paling signifikan. Skor 0 mengindikasikan lemahnya tata kelola dan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) serta Tambahan Uang Persediaan (TUP).
3. Nilai Kinerja Perencanaan vs. Pelaksanaan (Sinkronisasi), grafik memperlihatkan bahwa terdapat konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam optimalisasi efisiensi belanja. Hal ini sejalan dengan hasil penilaian SMART sebelumnya, dimana aspek efisiensi masih menjadi tantangan utama. Dari sisi perencanaan, Balai Litbang Agama Makassar sudah berada pada jalur

yang benar dengan efektivitas CRO yang sempurna. Namun, karena efisiensi perencanaan belum bisa diukur, masih ada potensi ketidakseimbangan dengan pelaksanaan. Hal ini tercermin pada pelaksanaan anggaran, di mana serapan tinggi tetapi kualitas output belum maksimal, dan efisiensi masih menjadi titik lemah. Dengan kata lain, perencanaan yang efektif belum sepenuhnya diikuti oleh pelaksanaan yang efisien.

3.3 Implementasi Arah Kebijakan dan Strategi

Implementasi arah kebijakan dan strategi pada Balai Litbang Agama Makassar merupakan proses untuk mengubah sasaran makro dalam dokumen Renstra menjadi program dan kegiatan konkret yang dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat dan stakeholders. Tahapan implementasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerjemahan Kebijakan ke dalam Program dan Kegiatan

Arah kebijakan Kementerian Agama yang menekankan pada penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan publik, serta profesionalisme ASN diterjemahkan oleh BLAM ke dalam program unggulan. Misalnya, arah kebijakan moderasi beragama diwujudkan dalam bentuk *Festival Musik Moderasi Beragama* bagi Generasi Z, advokasi Rumah Moderasi Beragama di PTKN, serta sosialisasi Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

2. Integrasi dalam Dokumen Perencanaan Tahunan

Program unggulan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (Perkin). Pada tahap ini, setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja serta alokasi anggaran dalam RKA-KL. Sebagai contoh, evaluasi layanan KUA di Sulbar dan Sulsel melalui program *Revitalisasi KUA* ditetapkan sebagai kegiatan prioritas yang memperoleh dukungan anggaran khusus.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Unit kerja kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Pada tahap ini, koordinasi lintas bidang diperkuat agar pelaksanaan berjalan sinergis. Misalnya, kegiatan *Religiosity Mapping* dilaksanakan dengan melibatkan tim peneliti, analis kebijakan, serta dukungan kerjasama eksternal dengan perguruan tinggi. Begitu pula program *Smart ASN* di Kanwil GTO yang dijalankan untuk mendukung arah kebijakan peningkatan kompetensi ASN berbasis digital.

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Capaian indikator, seperti persentase serapan anggaran, jumlah policy paper yang dimanfaatkan, dan persentase layanan publik yang memiliki SOP, diukur setiap triwulan dan tahunan. Hasil monev digunakan untuk perbaikan, misalnya menyesuaikan target ketika terjadi refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, atau mengalihkan fokus indikator saat fungsi litbang dialihkan ke BRIN.

Dengan tahapan implementasi tersebut, arah kebijakan dan strategi yang semula hanya tertuang dalam dokumen Renstra dapat diterjemahkan ke dalam program nyata yang relevan, seperti Festival Moderasi Beragama, Revitalisasi KUA, Religiosity Mapping, serta pengembangan policy paper berbasis hasil penelitian. Proses implementasi ini memastikan

bahwa BLAM tetap berperan sebagai motor penggerak kebijakan Kementerian Agama, meskipun menghadapi dinamika struktural dan kebijakan nasional.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang bermunculan dari ide-ide baru ketika terjadi peristiwa nasional seperti pandemi Covid-19 di tahun 2020, transisi kelembagaan di tahun 2021, efisiensi anggaran dengan adanya blokir AA, dan berbagai dinamika lainnya. Sejumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang semula dilakukan secara tatap muka dialihkan ke dalam bentuk daring (online) demi pemenuhan output dengan anggaran yang telah difocusing.

Kegiatan yang tidak tercantum sebelumnya dalam dokumen Renstra, namun kemudian menjadi program kreatif dan inovatif Balai Litbang Agama Makassar antara lain:

1. Penguatan Moderasi Beragama berbasis media kreatif, penyelenggaraan Festival Musik Moderasi Beragama untuk Generasi Z, sebagai media edukasi dan diseminasi nilai moderasi dengan pendekatan seni dan budaya.



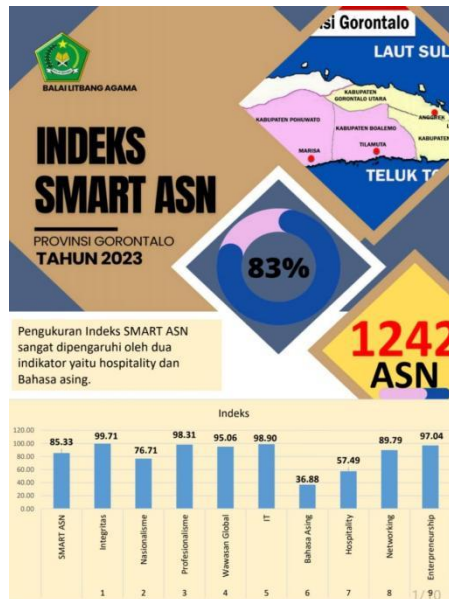
Gambar 3.10 Festival Musik

2. Program BLAMCorner, inovasi layanan publik berupa pojok literasi dan informasi keagamaan, yang menampilkan hasil penelitian, policy paper, infografis, serta akses digital ke publikasi BLAM.



Gambar 3.11 BlamCorner

- Kegiatan penelitian berbasis daring, adaptasi metode penelitian menggunakan studi kepustakaan online, survei digital, dan FGD daring yang tetap menjaga kualitas output di tengah keterbatasan lapangan.



Gambar 3.12 Kegiatan penelitian berbasis daring

- Policy Paper sebagai produk unggulan, peralihan fokus dari laporan penelitian konvensional menjadi policy paper yang langsung memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).



Gambar 3.13 Policy Paper

5. Kolaborasi eksternal membangun jejaring dengan BRIN, PTKIN, dan lembaga riset lokal untuk menutupi keterbatasan SDM peneliti setelah transisi kelembagaan tahun 2021.



Gambar 3.14 Kegiatan Kerja Sama

Dengan lahirnya kegiatan-kegiatan kreatif tersebut, Balai Litbang Agama Makassar berhasil menjaga relevansi program di tengah keterbatasan, sekaligus menunjukkan kemampuan adaptif menghadapi perubahan eksternal yang cepat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2020-2024 menunjukkan capaian kinerja yang secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator utama yaitu Pertama, Keselarasan Perencanaan dan Anggaran: Tingkat keselarasan dokumen perencanaan program dan anggaran dengan arah strategis Renstra mencapai 100%, bahkan jumlah dokumen yang disusun melampaui target hingga 120%. Hal ini menandakan adanya penguatan tata kelola perencanaan yang semakin konsisten dan akuntabel.

Kedua, Pelaksanaan Anggaran: Tingkat penyerapan anggaran rata-rata mencapai 99,46%, melampaui target yang ditetapkan (96%). Kondisi ini menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran yang mampu menjaga keseimbangan antara perencanaan dan realisasi, meskipun terdapat dinamika refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19. Ketiga, Pengelolaan Aset: Indikator inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) tercapai penuh 100%, sesuai target. Hal ini mencerminkan adanya ketertiban administrasi serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.

Keempat, Pelayanan Publik: Seluruh layanan publik Balai telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga indikator keterpenuhan SOP layanan mencapai 100%. Hal ini menegaskan adanya standardisasi layanan yang konsisten, efektif, dan akuntabel. Kelima, Profesionalisme ASN: Aspek ini masih menghadapi tantangan serius. Capaian indikator profesionalisme ASN hanya mencapai 60,74% (dari target 97%) dan indikator leveling kompetensi baru 41,4% (dari target 90%). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ASN perlu menjadi prioritas utama di masa mendatang.

Keenam, Transformasi Kelembagaan: Perubahan mendasar akibat lahirnya BRIN dan Perpres Nomor 12 Tahun 2023 serta Perpres Nomor 152 Tahun 2024 berdampak signifikan pada fungsi Balai. Beberapa indikator kinerja yang terkait dengan fungsi kelitbangan tidak lagi dapat digunakan, sehingga hanya 3 IKK yang dipertahankan hingga akhir periode 2024: Jumlah Policy Paper yang dimanfaatkan, Persentase publikasi hasil penelitian dan pengkajian, dan Jumlah produk penelitian yang memperoleh HaKI. Secara keseluruhan, capaian kinerja dukungan manajemen Balai Litbang Agama Makassar berada pada angka 91,09% (kategori baik). Keberhasilan terlihat jelas pada aspek perencanaan, penganggaran, dan layanan publik, meskipun aspek pengembangan SDM ASN masih perlu ditingkatkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa saran strategis yang dapat diajukan antara lain:

- 1. Penguatan Kompetensi ASN**

- Mengintensifkan program pengembangan kompetensi melalui diklat,

coaching, dan sertifikasi.

- Mengoptimalkan pemanfaatan platform digital (LMS) untuk memperluas akses pelatihan.
- Mendorong sistem merit yang lebih kuat dalam penilaian dan pembinaan karier ASN.

2. Optimalisasi Fungsi Kelembagaan Pasca Transformasi:

- Memperkuat peran Balai dalam bidang analisis kebijakan, sosialisasi, dan advokasi kebijakan moderasi beragama.
- Mengembangkan kerja sama strategis dengan BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk menutupi keterbatasan fungsi penelitian.

3. Peningkatan Kualitas Output Penelitian dan Policy Paper:

- Memastikan hasil penelitian yang dituangkan dalam policy paper relevan dengan isu aktual keagamaan dan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan.
- Memperkuat sistem digitalisasi data dan policy paper agar lebih mudah diakses oleh stakeholders.

4. Inovasi dalam Pelayanan Publik dan Pengelolaan Aset:

- Memperluas layanan publik berbasis digital agar lebih inklusif.
- Mengembangkan pengelolaan aset tidak hanya sebatas inventarisasi, tetapi juga pemanfaatan produktif untuk mendukung kegiatan kelembagaan.

5. Konsistensi dalam Perencanaan dan Anggaran:

- Memastikan seluruh dokumen perencanaan, baik Renstra, RKT, maupun Perkin, selalu sinkron dengan kebutuhan aktual organisasi.
- Memanfaatkan fleksibilitas perencanaan anggaran untuk mengantisipasi dinamika kebijakan nasional maupun keadaan darurat.